

**PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASAR  
TRADISIONAL DALAM MENINGKATKAN  
CITRA PASAR TRADISIONAL  
(STUDI PADA PASAR WONOKERTO, KABUPATEN KEDIRI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**EDI SUDRAJAD**

**NIM.145030107111012**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2018**

## MOTTO

*Orang akan segera lupa seberapa cepat kamu mampu menyelesaikan pekerjaan, tetapi mereka akan selalu mengingat sebaik apa pekerjaan itu kamu selesaikan*

(Howard W. Newton)



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan  
Citra Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Wonokerto, Kabupaten  
Kediri)

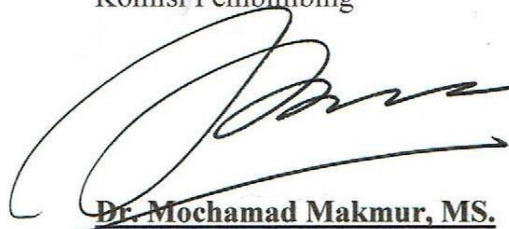
Disusun Oleh : Edi Sudrajad

NIM : 145030107111012

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 20 Maret 2018  
Komisi Pembimbing

  
**Dr. Mochamad Makmur, MS.**  
**NIP. 19511028 198003 1 002**

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 April 2018

Jam : 09.00-10.00 WIB

Skripsi atas nama : Edi Sudrajad

Judul : Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Wonokerto, Kabupaten Kediri)

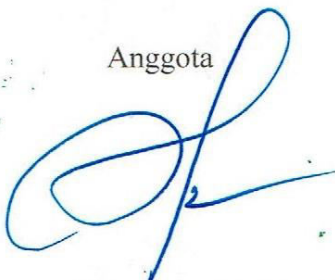
**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



**Dr. Mochamad Makmur, MS.**  
**NIP. 195110028 198003 1 002**

Anggota



**Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc**  
**NIP. 19560801 198701 1 001**

Anggota



**Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP**  
**NIP. 2011078607242001**

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 20 Maret 2018

Mahasiswa,



Nama : Edi Sudrajad

NIM : 145030107111012

## RINGKASAN

Edi Sudrajad, 2018. **Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Wonokerto Kabupaten Kediri)**. Dr. Mochamad Makmur, MS, Universitas Brawijaya, hal + .

Pemberdayaan pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan citra pasar tradisional yang sudah mulai redup, maka sudah selayaknya pemerintah melakukan langkah konkret terkait dalam pemberdayaan dan perbaikan pada pasar tradisional. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 ayat (1) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bahwasannya pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan dan meningkatkan kualitas pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2011-2016, menempatkan pembangunan dan pemberdayaan pasar tradisional sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini maka dapat diperoleh data yang akurat yang berasal dari dokumen-dokumen, pengamatan, dokumentasi maupun hasil wawancara. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang isi dari skripsi ini.

Pemerintah Kabupaten Kediri bersama *stakeholder* terkait melakukan upaya penguatan pedagang pasar tradisional melalui sosialisasi, pengarahan informal, menjaga ketertiban dan adanya paguyuban pasar. Pengarahan di Pasar Wonokerto sering kali kurang memperhatikan tingkat SDM pedagang, perlindungan terhadap pedagang Pasar Wonokerto salah satunya menggunakan SITU yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 Pasal 3 ayat (1), pembentukan koperasi pasar ini dinilai oleh pemerintah Kabupaten Kediri sebagai salah satu upaya pemeliharaan pedagang Pasar Wonokerto. Faktor yang mendukung peningkatan citra Pasar Wonokerto di Kabupaten Kediri adalah terlaksananya revitalisasi pasar yang dilakukan pada tahun 2015 yang dimana Pasar Wonokerto lebih tertata dan menarik banyak konsumen serta produsen sebagai sarana jual beli. Selain itu faktor penghambat pemberdayaan Pasar Wonokerto sangat harus diperhatikan dalam hal sumber daya manusia, fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Wonokerto, maupun anggaran yang harus dibagi, hal itu sangat berdampak dalam Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional, Citra Pasar Tradisional, Pasar Wonokerto, Kabupaten Kediri



## SUMMARY

Edi Sudrajad, 2018. **The Empowerment of the Traditional Market Trader to Increase the Traditional Market's Image (Studi on Wonokerto Market, Kediri Regancy.** Dr. Mochamad Makmur, MS, Universitas Brawijaya, hal + .

It could be stated that the traditional market's image started to diminish: therefore, it was right and proper that the government did a concrete measure concerning the empowerment and improvement of the traditional market. As regulated in the 2014 Trade Law Article 13 Section (1) that the central government cooperated together with the local government in order to do development, empowerment, and increase the quality of the public market for competitiveness. Therefore, the Kediri Regency Administration through the Regional Mid-Term Plan (RMTP) for 2011-2016 periods set the development and empowerment of the traditional market as one of the development priorities.

The research method used was descriptive research through qualitative approach. By using this method, the accurate data could be obtained from documents, observation, documentation and interview result. The data was analyzed using interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana. The conclusion of the thesis content was drawn afterwards.

The Kediri Regency Administration, along with the related stakeholder, made a strengthening effort, keeping order, and the availability of the market community. The direction in Wonokerto Market frequently paid less attention to the protection of Wonokerto Market trader, one of which used *SITU* that was Regional Regulation Number 12/2014 Article (3) Section (1). The establishment of the Market Cooperative was evaluated by the Kediri Regency Administration as one of the maintenance efforts of Wonokerto Market trader. The supporting factor of the increase Wonokerto Market's image as the central market in Kediri Regency was the implementation of market revitalization carried out in 2015, in which Wonokerto Market was more organized and could attract a lot of consumers and producers as means of trading. Besides, the inhibiting factors of the empowerment of Wonokerto Market which should be considered were ranging from Human Resources, the facilities in Wonokerto Market, and the budget which should be divided. Those matters had an impact on the Empowerment of the Traditional Market Trader to Increase the Traditional Market's Image.

**Keywords:** The Empowerment of the Traditional Market Trader, the Traditional Market's Image, Wonokerto Market, Kediri Regancy.

Kupersembahkan karya ini kepada

*Kedua Orang Tua Ku*

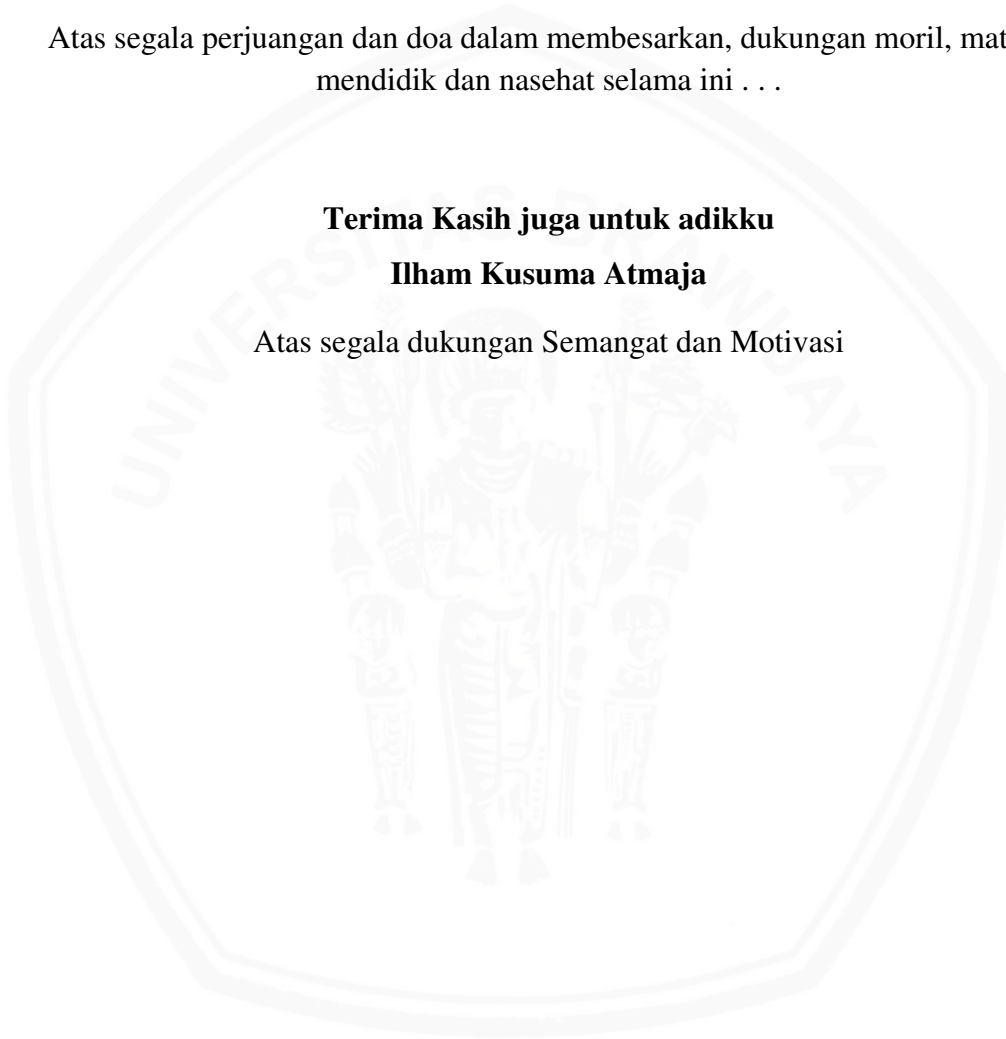
*Tris Mulyadi  
Narsiah*

Atas segala perjuangan dan doa dalam membesarkan, dukungan moril, materi,  
mendidik dan nasehat selama ini . . .

**Terima Kasih juga untuk adikku**

**Ilham Kusuma Atmaja**

Atas segala dukungan Semangat dan Motivasi





## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Wonokerto, Kabupaten Kediri)”** dapat penulis selesaikan. Sebagai pemenuhan untuk mendapatkan gelar sarjana jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, penulis mengucapkan terima kasih atas segala pengetahuan, dukungan, dan motivasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brwaijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS selaku dosen pembimbing skripsi saya yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan saya terkait penelitian yang saya selesaikan.
5. Bapak Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc selaku majelis penguji skripsi saya yang telah memberikan saran perbaikan dan masukan terkait penelitian saya.
6. Ibu Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP selaku majelis penguji skripsi saya yang telah memberikan saran perbaikan dan masukan terkait penelitian saya.

7. Bapak Zaenuri S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri yang sudah senantiasa memberikan saya informasi terkait penelitian saya dan memberikan wawasan kepada saya.
8. Bapak Sumarno selaku Kepala UPTD Pasar Wonokerto yang sudah senantiasa memberikan saya informasi terkait penelitian saya dan memberikan wawasan kepada saya.
9. Bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga tugas akhir program sarjana yang penulis selesaikan, pengalaman maupun ilmu yang diterima dapat membantu penulis menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi sesama. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan mohon maaf jika tulisan ini masih jauh dari sempurna.

Malang, 20 Maret 2018

Edi Sudrajad

## DAFTAR ISI

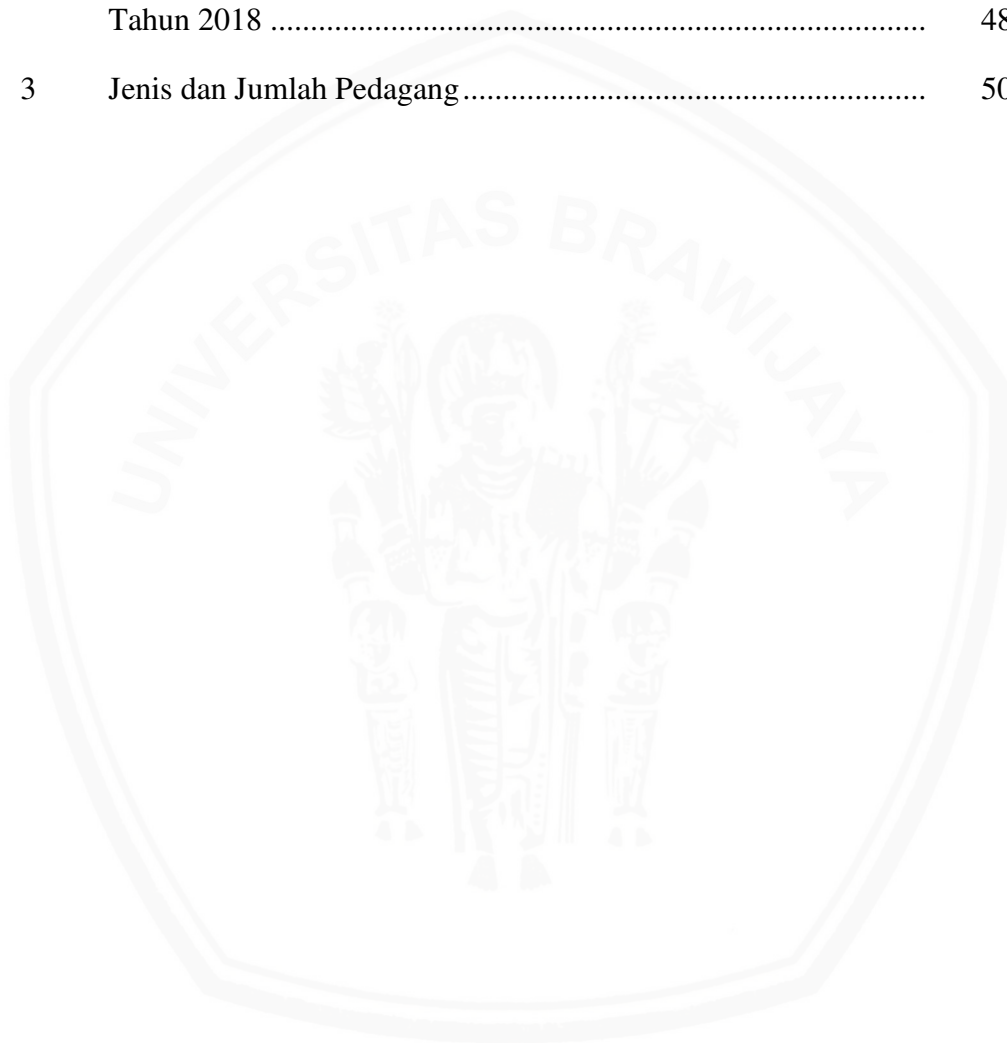
MOTTO .....	ii
TANDA PERSETUJUAN .....	iii
TANDA PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 <b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II            TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pemberdayaan .....	11
1. Pengertian Pemberdayaan .....	11
2. Tujuan Pemberdayaan .....	14
3. Tahap-tahap Pemberdayaan .....	16
4. Strategi Pemberdayaan .....	20
5. Pemberdayaan Pasar Tradisional .....	23
B. Teori Pasar.....	26
1. Pengertian Pasar .....	26
2. Berdasarkan Sifat Perdagangannya.....	26
3. Fungsi Pasar .....	27
4. Pengertian Pasar Tradisional.....	29
5. Ciri-ciri Pasar Tradisional .....	31
 <b>BAB III           METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Fokus Penelitian .....	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
1. Jenis Data .....	35
2. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Keabsahan Data .....	40

	G. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
	1. Gambaran Umum Pasar Wonokerto Kabupaten Kediri .....	46
	2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri .....	51
	B. Penyajian Data.....	53
	1. Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional .....	53
	2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional oleh Pemerintah dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional .....	67
	C. Pembahasan .....	76
	1. Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional .....	76
	2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional oleh Pemerintah dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional .....	92
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	102
	B. Saran.....	104

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Daftar Informan.....	37
2	Nama dan Jabatan Pegawai Di Pasar Wonokerto Tahun 2018 .....	48
3	Jenis dan Jumlah Pedagang.....	50

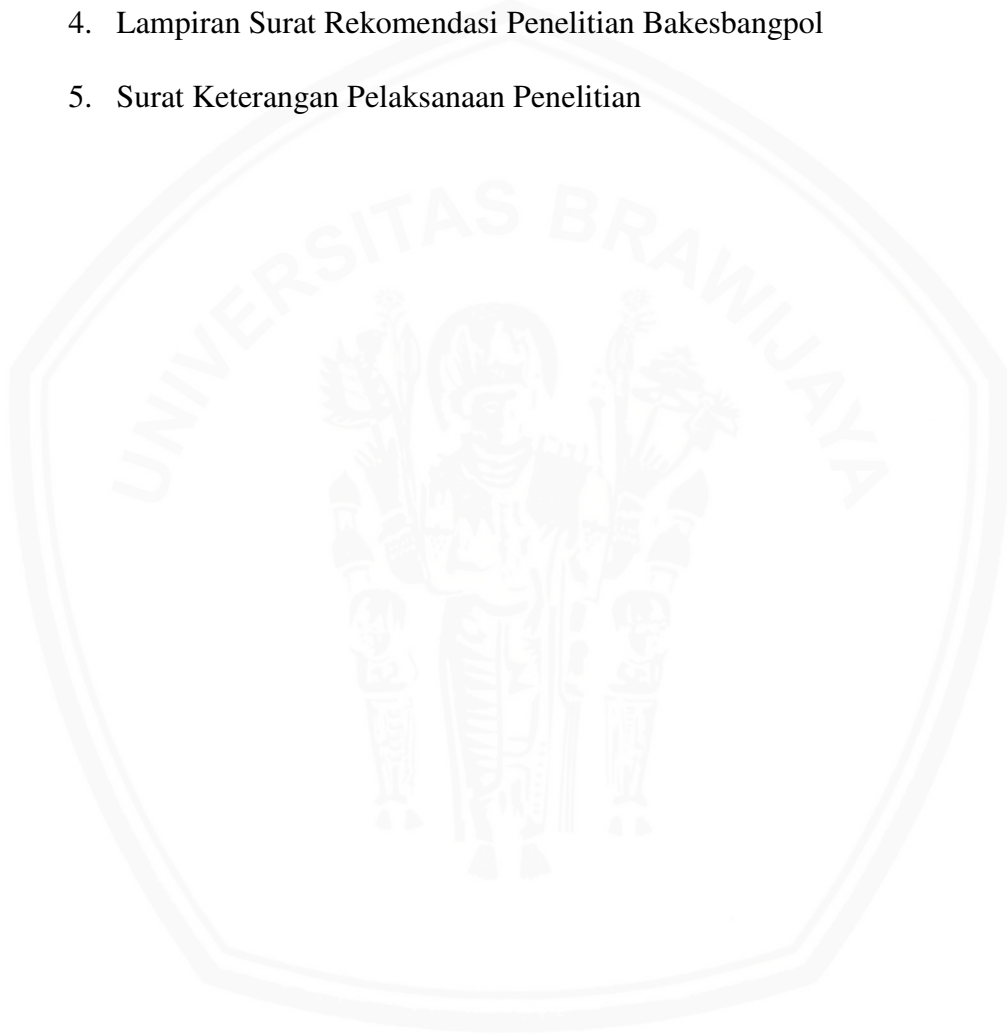


**DAFTAR GAMBAR / BAGAN**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Unsur-Unsur Pemberdayaan .....	20
2	Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif (Miles, Huberman dan Saldana).....	42
3	Peta Wilayah Kabupaten Kediri.....	46
4	Struktur Organisasi Pasar Wonokerto.....	48
5	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Peraturan Daerah
2. Lampiran Foto Wawancara
3. Lampiran Surat Riset
4. Lampiran Surat Rekomendasi Penelitian Bakesbangpol
5. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan menjadi salah satu ruh yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Selanjutnya pembangunan secara lebih rinci dijelaskan oleh Conyers dan Hill (1990) yaitu adalah suatu proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan dan pilihan, tentang cara-cara, alternatif menggunakan sumberdaya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu pada beberapa waktu di masa depan.

Paradigma pembangunan berkembang searah dengan perkembangan jaman, menurut Suryono (2010) menjelaskan terdapat beberapa paradigma pembangunan, yaitu paradigma pertumbuhan, paradigma pemerataan, paradigma teknologi tepat guna, paradigma kebutuhan dasar pembangunan, pembangunan keberlanjutan, dan yang paling terakhir adalah paradigma pemberdayaan. Paradigma pemberdayaan ini lahir dikarenakan adanya dua premis mayor antara kegagalan dan harapan. Kegagalan dalam pengembangan model pembangunan ekonomi untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan lingkungan, sedangkan harapan dikarenakan adanya alternatif-alternatif pembangunan dan juga potensi-potensi yang dapat dikembangkan.

Perkembangan pembangunan saat ini telah memasuki era baru yang lebih modern, dimana pada saat ini menawarkan nilai-nilai modernitas dalam setiap

sendi pembangunan. Salah satu yang termasuk dalam instrumen pembangunan ekonomi adalah pasar tradisional. Pasar tradisional dijelaskan oleh Malano (2011) pasar tradisional ialah tempat bertemunya pembeli dan penjual dengan berinteraksi secara langsung dengan sistem tawar menawar. Telah lama masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan menggunakan pasar tradisional dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional selain menawarkan harga barang yang relatif murah, berbagai kebutuhan di pasar tradisional juga masih dapat ditawarkan.

Akan tetapi dewasa ini apa yang menjadi citra dari pasar tradisional terkesan buruk, mulai dari aspek infrastruktur tidak baik seperti cat yang sudah kusam, sampah berserakan dimana-mana, jalan yang becek, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi pada pasar tradisional, berbanding terbalik dengan kondisi pasar modern seperti minimarket, hypermarket, supermarket, mall dan yang sejenisnya. Pada pasar modern, pengunjung ditawarkan berbagai kelebihan pasar modern seperti halnya kondisi bangunan yang kuat, cat yang menarik perhatian sehingga pengunjung tidak bosan, ruangan memakai *air conditioner* (AC), penataan barang dagangan yang tertata rapi sehingga memudahkan pembeli untuk memilih barang yang dicarinya, serta bau yang sedap untuk menciptakan kenyamanan kepada pembeli di pasar modern.

Dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki pasar modern, tentunya masyarakat akan lebih cenderung memilih pasar modern dibandingkan pasar tradisional, terlebih lagi saat ini masyarakat di era modern sudah mengalami pergeseran paradigma dalam cara memenuhi kebutuhannya. Pertumbuhan pasar

modern saat ini memang sangat pesat bahkan sudah sampai di pelosok-pelosok desa. Kita bisa melihat adanya minimarket yang saling berdampingan ataupun berseberangan di desa-desa, maka tidak aneh lagi bagi masyarakat berduyun-duyun ketempat yang menawarkan berbagai kelebihan dibandingkan pasar tradisional. Tentunya hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pasar tradisional untuk menjaga eksistensinya. Sebagaimana diungkapkan dari hasil survei AC Nielsen, bahwa pada 2007 pasar tradisional di Indonesia ada 13.550 unit, namun pada 2009 jumlahnya berkurang menjadi 13.450 unit, bahkan merosot menjadi 9.950 unit pada 2011. Pertumbuhan pasar rakyat minus 8%, sebaliknya pasar modern tumbuh 31,4% dari 10.365 menjadi 20.000 gerai. Selanjutnya menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), penurunan jumlah pasar tradisional disebabkan oleh ekspansi yang dilakukan oleh pasar modern yang merambah sampai ke pelosok desa (Kompas, 2015).

Akan tetapi sebenarnya pasar tradisional menawarkan berbagai kelebihan-kelebihan. Jika dikaji lebih mendalam mengenai potensi ekonomi, maka terdapat setidaknya empat fungsi yang diperankan oleh pasar tradisional (USDRP : 2012), yaitu :

1. Pasar tradisional memfasilitasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhannya sehari-hari dengan harga relatif murah;
2. Pelaku ekonomi lemah lebih mudah mengakses pasar tradisional. Salah satu hal yang terpenting dari keberadaan pasar tradisional ialah pasar tradisional merupakan wadah bagi para pelaku ekonomi berskala kecil

atau mikro dalam menjual hasil produksi mereka seperti para petani, nelayan, industri rumahan, dan yang sejenisnya;

3. Merupakan suatu pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan dan pengoperasian pasar setiap harinya;
4. Pasar merupakan salah satu sarana penyerapan tenaga kerja baru yang cukup signifikan jumlahnya. Dengan banyaknya jumlah pasar tradisional maka juga semakin banyak pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung seperti pedagang, maupun yang secara tidak langsung seperti petani, nelayan, dan sebagainya.

Pasar tradisional yang identik dengan adanya proses tawar menawar hal ini menumbuhkan interaksi sosial antara pedagang dan juga pembeli sehingga munculah keramah tamahan yang menjadi karakter khas pasar tradisional yang tidak dimiliki oleh pasar modern, selain itu pasar tradisional juga menawarkan kebutuhan pokok yang lebih lengkap dibanding pasar modern serta dengan harga yang tentunya lebih murah dibandingkan dengan pasar modern. Dilihat dari sisi aktifitas, pasar tradisional beraktifitas lebih singkat dibandingkan dengan pasar modern yang beraktifitas 24 jam dalam sehari.

Namun, keberadaan pasar tradisional yang merupakan warisan turun temurun dari pendahulu pelaku ekonomi di Indonesia, saat ini tengah mengalami kemunduran dan kelesuan. Hal ini baik diakibatkan oleh faktor internal pelaku pasar tradisional sendiri dan juga faktor eksternal dengan semakin berkembang pesatnya keberadaan pasar modern yang lebih memanjakan para konsumen.

Permasalahan internal yang terjadi pada pasar tradisional beberapa diantaranya ialah masih adanya stigma buruk yang berkembang dan melekat di masyarakat tentang citra pasar tradisional yang selama ini identik dengan tempat yang becek, kumuh, bau, kusam, dan kondisi bangunan yang tidak menarik minat pengunjung. Hal ini tidak bisa lepas dari perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh para pelaku pasar tradisional terutama para pedagang pasar, secara umum permasalahan yang terjadi pada para pedagang ialah masih sulitnya pedagang untuk diatur maupun mengatur diri dalam masalah penataan pedagang, kesadaran yang rendah baik para pedagang maupun pengunjung pasar terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban, serta salah satu yang terpenting ialah pemahaman yang rendah terhadap perilaku konsumen dimana keadaan konsumen yang berubah-ubah namun pedagang pasar tidak mampu mengikuti karena keterbatasan informasi dan kemampuan serta kurangnya persiapan menghadapi persaingan. Beberapa hal inilah yang mengakibatkan seakan-akan pasar tradisional sangat sulit untuk berkembang, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pengunjung di pasar tradisional.

Dengan melihat berbagai permasalahan yang terjadi terutama pada aspek rendahnya profesionalisme pedagang, maka sangat dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga *stakeholders* lainnya untuk memberdayakan pedagang pasar tradisional. Pemberdayaan diartikan oleh Priyono dan Pranarka (1996) ialah pemberian daya ataupun kemampuan pada suatu obyek tertentu untuk dapat secara mandiri mengurus dirinya sendiri. Hal ini berarti pedagang pasar tradisional perlu diberikan kemampuan ataupun kekuatan untuk

mampu bersaing dalam persaingan ekonomi dan meningkatkan citra pasar tradisional sehingga menarik minat pembeli. Tentunya dibutuhkan peran dari pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak pengelola pasar tradisional yang juga memiliki kekuatan dan akses untuk mengatur pasar tradisional dengan kemampuan anggaran dan kebijakan.

Pemberdayaan pedagang pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwasannya pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Hal ini lebih diperinci oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dimana pada Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa Kepala Daerah melakukan pemberdayaan pasar tradisional yang meliputi:

1. Meningkatkan profesionalisme pengelola;
2. Meningkatkan kompetensi pedagang pasar;
3. Meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Lebih rinci dijelaskan pada Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;

- c. Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. Memahami perilaku pembeli.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Prastyawan (2014) yang menjelaskan pemberdayaan pedagang pasar tradisional dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen bisnis yang modern, cara-cara menata barang dagangan, higienitas, serta cara-cara dalam melayani konsumen.

Melihat pentingnya suatu pemberdayaan pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan citra pasar tradisional yang sudah mulai redup, maka sudah selayaknya pemerintah melakukan langkah konkret terkait dalam pemberdayaan dan perbaikan pada pasar tradisional, dengan begitu diharapkan terdapat perubahan pada gambaran yang ada pada pasar tradisional sehingga lebih menarik minat pembeli dan memiliki kemampuan dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat dengan semakin marak dan berkembang pesatnya pasar modern yang sudah sampai desa-desa.

Kabupaten Kediri terletak di Provinsi Jawa Timur, yang notabene Kabupaten Kediri merupakan daerah yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, sehingga masyarakat masih mempercayakan kepada pasar tradisional dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, saat ini telah mulai menjamurnya pasar modern yang berupa minimarket-minimarket di kawasan pedesaan, tentunya ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan pasar tradisional di Kabupaten Kediri jika pelaku pasar tradisional khususnya pedagang pasar tidak berbenah diri dari berbagai kelemahan-kelemahan yang ada. Tentunya dengan berbagai kelebihan-



kelebihannya, masyarakat Kabupaten Kediri lambat laun akan semakin meninggalkan pasar tradisional dan beralih ke pasar modern.

Pasar Wonokerto merupakan salah satu pasar tradisional yang terbilang cukup besar di Kabupaten Kediri, letaknya dipinggir jalan raya yang sangat mudah diakses oleh kendaraan umum, serta berada tidak jauh dari pusat keramaian di Kabupaten Kediri. Selain itu pada Pasar Wonokerto terdapat kantor pengelola pasar, pos keamanan, lokasi parkir, lokasi bongkar muat barang, tempat pembuangan sampah, tempat ibadah, dan toilet, maka hal ini sudah memenuhi syarat pendukung sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) huruf C Permendag Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Tentunya hal ini menjadi nilai lebih bagi Pasar Wonokerto untuk menarik minat pembeli. Akan tetapi kondisi Pasar Wonokerto yang juga tidak terlepas dari penyakit pasar tradisional yang becek, kumuh, kondisi bangunan yang tua, pengelolaan sanitasi yang buruk, pengelolaan parkir yang tidak tertata dengan baik dan juga permasalahan sumber daya manusia yaitu pedagang yang tidak disiplin dan tertib, penataan pedagang yang tidak teratur, pedagang yang tidak memedulikan kebersihan, maka dari itu tentunya hal ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri dalam memberdayakan pedagang di Pasar Wonokerto ini. Dari berbagai uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan ilmiah yang berjudul **“Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Wonokerto, Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemberdayaan pedagang pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan citra pasar tradisional?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pemberdayaan pedagang pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan citra pasar tradisional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengurai permasalahan tentang:

1. Pemberdayaan pedagang pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan citra pasar tradisional.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan pedagang pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan citra pasar tradisional.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian akademis sebagai alat wacana pembelajaran yang dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti peneliti sendiri, pemerintah, akademis, praktisi, dan seluruh *stakeholders* yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan atau referensi penelitian selanjutnya tentang bagaimana pemberdayaan pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan citra pasar tradisional dimana citra pasar tradisional di kalangan masyarakat terkesan buruk dan juga faktor-faktor dalam pemberdayaan pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan citra pasar tradisional.

## **E. Sistematika Penulisan**

Bab I : Menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan.

Bab III : Berisikan tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

Bab IV : Berisikan hasil penelitian, penyajian data, fokus penelitian dan pembahasan berupa analisa data berkenaan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

Bab V : Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yang diberikan guna melakukan perbaikan di masa mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Pemberdayaan

##### 1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” atau “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasar dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kemampuan atau proses pemberian daya kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Kata “*empowerment*” dan “*empower*” diterjemahkan dalam bahasa indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut kamus oxford (dalam Priyono dan Pranarka, 1996) mengandung dua pengertian yaitu: pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua adalah *to give ability to or enable*. Hal ini mengandung pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan, kekuatan atau keberdayaan.

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah khas Indonesia daripada istilah Barat. Di Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “*daya*” bukan “*kekuasaan*” daripada “*pemberdayaan*” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau dapat dikatakan memberi “*energi*”

pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri (Sumodiningrat, 2000 dalam Sulistiyani, 2004).

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di Barat merupakan suatu reaksi pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya (Winarni, 1998).

Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).

Pemberdayaan memerlukan keterlibatan berbagai *stakeholders* secara aktif. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung akibat adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesis terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut : (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan

faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Soetomo (2011) dalam buku yang beliau karang yaitu yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?” menyebutkan dalam implementasinya konsep pemberdayaan diperlukan beberapa hal, diantaranya:

1. Reorientasi, yaitu dikarenakan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda maka akan memunculkan asumsi, filosofi, dan logika berpikir yang berbeda-beda untuk itu dibutuhkan reorientasi sebagai langkah mempersatukan dan menyamakan orientasi yang bersama.
2. Gerakan sosial, yaitu menciptakan suatu iklim dalam kehidupan masyarakat yang mendorong pengambil kebijakan untuk memperhatikan nilai-nilai pemberdayaan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan masyarakat.

3. Institusi lokal, yaitu berfungsi memfasilitasi tindakan bersama yang terpola, sehingga fungsinya bukan hanya suatu organisasi tetapi juga pranata sosial.
4. Pengembangan kapasitas, yaitu unsur utama pemberdayaan disamping pemberian kewenangan, untuk mewujudkan suatu kemandirian.

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan sudah sepatutnya diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber kekuatan. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dispowerment*, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umum dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran tersebut berputar terus menerus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan (Priyono dan Pranarka, 1996).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan



memandirikan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. lebih lanjut, perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut dengan demikian, untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisikmaterial.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan

keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Konsep pemberdayaan dapat dikatakan sebagai jawaban atas realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Mereka yang tidak berdaya adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya. Secara lebih lengkap suatu pemberdayaan memiliki maksud untuk :

1. Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti suatu usaha untuk memformulasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka.
2. Pemberdayaan bermakna keluar, sebagai upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyatanya merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam segi ini bermakna sebagai pengendali yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat (Pambudi, 2003).

Lebih lanjut, tujuan daripada pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Winarni, 1998).

### **3. Tahap-tahap Pemberdayaan**

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Sulistiyani, 2004). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap

dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Pendapat tentang penahanan pemberdayaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004), tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat ini, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai

oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi dalam lingkungannya.

Dubois dan Miley, 1992 (dalam Suharto, 2005) memberikan beberapa cara dan teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Membangun relasi dari pertolongan yang: (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri; (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien.
- b. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembangan profesionalisme, riset, dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi dalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Dalam mengukur apakah proses pemberdayaan berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukurnya. Adapun indikator tersebut menurut Suhendra (2006:86), yaitu:

1. Masyarakat mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat;
  2. Dapat berjalannya "*bottom up planning*";
  3. Memampukan dan aktivitas ekonomi;
  4. Kemampuan menyiapkan masa depan keluarga;
  5. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.
- Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.

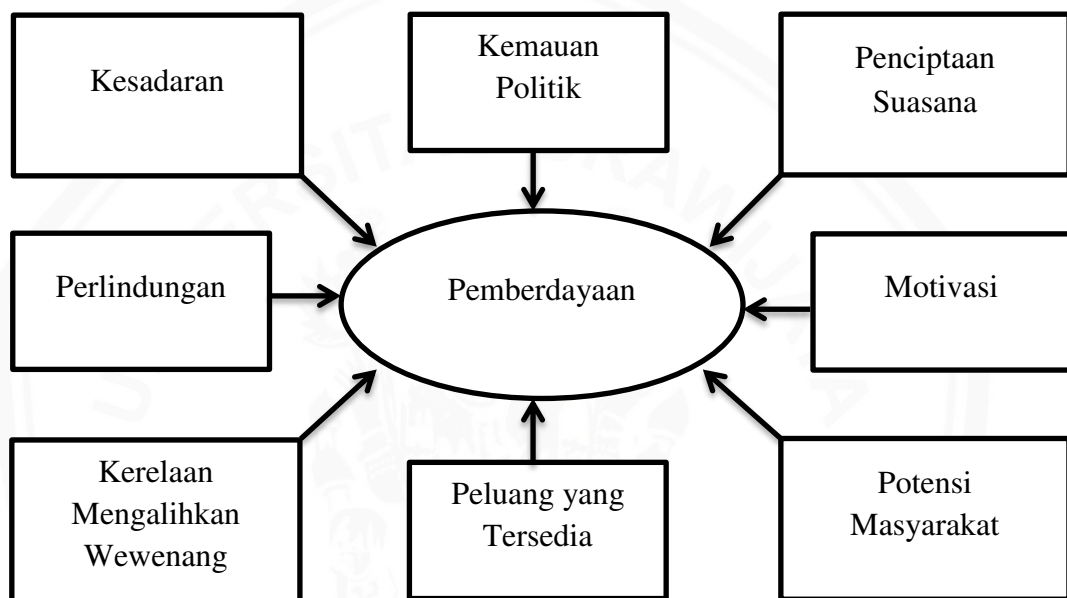
Dengan demikian berarti tahapan pemberdayaan yang dimaksud, yaitu harus dilakukan dengan berkesinambungan, terarah dan melibatkan semua potensi yang ada. Pemberdayaan dilaksanakan melalui tahap penyadaran, tahap transformasi, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual yang dimulai dari pemberdayaan individu lalu kemudian pemberdayaan kelompok.

Adapun unsur-unsur pemberdayaan menurut Suhendra (2006:87) diantaranya adalah:

- a. Kemauan politik yang mendukung;
- b. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh;
- c. Motivasi;
- d. Potensi masyarakat;

- e. Peluang yang tersedia;
- f. Kerelaan mengalihkan wewenang;
- g. Perlindungan;
- h. Kesadaran.

#### Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat



Gambar 2.1 Unsur Pemberdayaan. (Sumber: Suhendra, 2006).

#### 4. Strategi Pemberdayaan

Strategi yang dimaksud dalam pemberdayaan berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan. Melalui metode yang diupayakan ditemukan cara yang sederhana tetapi terorganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan.

Terkait kebijakan masyarakat yang strategis menurut Nugroho (2009) mengacu pada tiga ukuran, antara lain:

- a. Pertama, pada tujuan. Di sini kita menangkap bahwa tujuannya adalah *menjadikan rakyat berdaya*. Berdaya artinya mempunyai kemampuan untuk membangun diri sendiri (secara individual maupun berkelompok) tanpa terlalu banyak memerlukan uluran tangan pemerintah.
- b. Kedua, mengacu pada konteks tantangan saat ini dan masa depan.
- c. Ketiga, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Prinsip ini setara dengan prinsip manajemen, yakni optimalisasi sumber daya.

Pendapat lain menurut Parsons dalam Suharto (2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam konteks pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu:

- a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Model ini sering di sebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task Centered Approach*).

- b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok lain sebagai media intervensi melalui pendidikan dan pelatihan serta dinamika kelompok.

- c. Aras Makro

Disebut sebagai strategi sistem besar (*Large System Strategy*) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami



situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (2005) dapat disingkat menjadi 5P, yaitu:

a. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka pendekatan serta strategi dalam pemberdayaan masyarakat haruslah mampu menyadarkan dan menggerakkan kemampuan masyarakat dalam berfikir, bertindak dan terlibat langsung dalam pembangunan. Idealnya dalam proses pemberdayaan dapat terjadi sinergi dari kelompok pemberi dan penerima pemberdayaan itu sendiri.

### **5. Pemberdayaan Pasar Tradisional**

Pemberdayaan pada hakekatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansional merupakan proses memutus dari hubungan antara objek dan subjek, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Dalam prakteknya, konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. *Kedua*, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. (Suyanto dalam Aziz, 2012)

Seperti yang disinggung bahwa unsur pemberdayaan itu adalah salah satunya menciptakan para pelaku pasar serta terciptanya suasana kondusif dan

keseimbangan ekonomi. Jika dilihat dari iklim pengembangan masyarakat, yaitu terciptanya *mainstream* ekonomi masyarakat yang dianggap penting dan efektif dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Sehingga dalam perkembangannya, ilmu pengembangan masyarakat memberikan alternatif bagi para pelaku pasar tradisional itu dibagi ke dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang konservatif dan pengembangan ekonomi masyarakat radikal.

Pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwasannya pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Hal ini lebih diperinci oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dimana pada pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa Kepala Daerah melakukan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

- a. Meningkatkan profesionalisme pengelola;
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
- c. Meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 19, peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a melalui:

- a. Penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. Penerapan manajemen yang profesional;
- c. Pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan

- d. Ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Selanjutnya pada Pasal 20, peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. Pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli; dan
- c. Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. Memahami perilaku pembeli.

Serta Pasal 21, peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. Pembenahan tata letak;
- b. Pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. Peningkatan kualitas konstruksi;
- d. Pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. Pembenahan sistem elektrikal;
- f. Penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. Pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 22, bupati / walikota melalui SKPD, melakukan:

- a. Memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukannya renovasi dan / atau relokasi pasar tradisional;
- b. Penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. Fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. Fasilitasi pembentukan wadah / asosiasi pedagang pasar.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Prastyawan (2014) yang menjelaskan pemberdayaan pasar tradisional dapat dilakukan dengan melakukan penataan dan membenahi pasar tradisional sehingga lebih bersih dan nyaman, zonasi pasar yang jelas dan sesuai dengan aturan, pemberdayaan pedagang melalui pelatihan manajemen bisnis yang modern, cara-cara menata dagangan, higienitas, serta cara-cara dalam melayani konsumen.

## **B. Teori Pasar**

### **1. Pengertian Pasar**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pasar dari segi ekonomi ialah interaksi antara pedagang dan pelanggan dalam menyepakati suatu harga dengan kuantitas dan kualitas barang tertentu. Kedua belah pihak menerima manfaat masing-masing.

Sedangkan menurut pendapat Belshaw dalam Devi (2013) menurut kajian ekonomi pasar merupakan suatu wadah atau tempat interaksi antara pembeli dan penjual dari suatu barang maupun jasa tertentu. Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar merupakan tempat jual beli antara pedagang dan pembeli setelah kedua belah pihak telah bersepakat untuk barang yang dijual maupun yang dibeli sebagai pemenuhan serta pemuasan kebutuhan seseorang.

### **2. Berdasarkan Sifat Perdaganganannya**

Pasar tradisional memiliki sifat perdagangan, yang dibagi menjadi 3 jenis yakni: Pasar Grosir, Pasar Eceran, dan Pasar Khusus. Pasar Grosir adalah pasar yang hanya melayani penjualan dalam partai besar (gross), Pasar Eceran adalah pasar yang melayani konsumen secara eceran, sedangkan Pasar Khusus adalah

pasar yang menjual barang-barang tertentu seperti pasar sapi, pasar gringging (Pakaian Bekas) dan pasar Loak Setono Betek (menjual barang-barang bekas). Namun ada juga pasar yang menjual barang dagangannya dengan cara grosir ataupun dengan cara eceran, pasar ini disebut dengan pasar semi grosir seperti Pasar Ngronggo.

### **3. Fungsi Pasar**

Menurut Darvis (1984) pasar merupakan wadah atau tempat untuk melayani masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, diantaranya segi ekonomi, sosial budaya, dan arsitektur.

Kemudian apa yang dijelaskan diatas lebih diperjelas oleh USDRP (2012) dalam tulisannya Pedoman Umum Pengelolaan Pasar, terdapat dua fungsi pasar yang utama, yaitu:

#### **1) Fungsi Pembangunan Ekonomi Masyarakat**

Pasar jika dikaji secara jernih memiliki beberapa fungsi yang pasar modern tidak dapat menggantikannya. Setidaknya ada lima fungsi ekonomi yang sejauh ini bisa diperankan oleh pasar tradisional, yaitu:

- a) Pasar tradisional memfasilitasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhannya sehari-hari dengan harga relatif murah.
- b) Pelaku ekonomi lemah mudah mengakses pasar tradisional.
- c) Merupakan suatu pemasukan bagi pendapatan daerah melalui pengelolaan dan pengoperasian pasar setiap harinya.
- d) Pasar merupakan salah satu sarana penyerapan tenaga kerja baru.

## 2) Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Terdapat beberapa fungsi kemasyarakatan dari keberadaan pasar tradisional, beberapa diantaranya ialah:

- a) Merupakan bentuk asli dari ciri khas ataupun karakter masyarakat.

Riuhnya pasar karena canda tawa, dan nilai-nilai kultural yang ada di masyarakat dapat dipotret dalam keseharian mereka dipasar.

- b) Merupakan wadah sosial untuk berinteraksi terutama mereka yang berkemampuan ekonomi rendah dan melakukan diskusi informal dari berbagai permasalahan yang sedang terjadi dikalangan masyarakat .

## 3) Fungsi Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan tujuan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan tujuan ekonomi, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana publik, dalam hal ini ialah pasar tradisional yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya dan merupakan sarana sirkulasi perekonomian publik dari proses pergerakan ekonomi.

Meskipun keberadaan pasar secara signifikan tidak mempengaruhi pendapatan suatu daerah, namun kelangsungan operasional pasar tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan sarana layanan bagi masyarakat.



Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, asas penyelenggaraan pelayanan publik dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

- a) Kepentingan Umum
- b) Kepastian
- c) Kepastian Hukum
- d) Kesamaan Hak
- e) Keseimbangan dan Kewajiban
- f) Profesional
- g) Partisipatif
- h) Persamaan Perlakuan
- i) Keterbukaan
- j) Akuntabilitas
- k) Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan
- l) Ketepatan Waktu, dan
- m) Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan.

#### **4. Pengertian Pasar Tradisional**

Pasar sebagai arena pertukaran kebutuhan hidup sehari-hari sudah dikenal sejak dahulu kala, sebelum masyarakat mengenal uang, pada jaman itu masyarakat masih lebih banyak memenuhi sendiri kebutuhan konsumsinya, dan penyelenggaraan hari pasar tidak dilakukan setiap harinya, namun pada hari tertentu saja, yang lebih dikenal dengan hari pasaran. Ketika masyarakat sudah mengenal uang sebagai alat yang sah untuk jual beli, maka pasar dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pasar.

Pasar semacam ini lebih dikenal dengan sebutan pasar tradisional, karena merupakan kelanjutan langsung dari pasar-pasar yang diselenggarakan secara tradisional pada hari-hari pasaran. Pasar tradisional dapat diartikan sebagai arena jual beli, yang dilembagakan dan dikelola secara resmi oleh Pemerintah Daerah, dimana aktifitas tersebut hanya didukung oleh sejumlah sarana serta tingkat kenyamanan yang secukupnya. Termasuk dalam kategori ini adalah pasar regional, pasar kota, pasar wilayah dan pasar lingkungan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, bahwa pasar tradisional ialah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta berupa tempat usaha toko, kios, los, dan tenda, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, pasar modern adalah pasar atau toko dengan sistem pelayanan mandiri, termasuk didalamnya seperti minimarket, supermarket, hipermarket, dan lain sebagainya ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Disamping ruang ekonomi, pasar tradisional juga merupakan ruang sosial dimana faktor yang tetap diminati ialah karakter atau budaya dari konsumen. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan pasar modern dan pasar tradisional salah satunya ialah dari proses tawar menawar, dimana pasar modern tidak ada tawar menawar, proses tawar menawar dapat memunculkan kedekatan emosi antara pedagang pasar tradisional dengan pembeli.

## 5. Ciri-ciri Pasar Tradisional

Secara pasti memang tidak ada referensi yang menyebutkan ciri-ciri pasar tradisional, namun bila kita melihat dari kenyataan yang ada di pasar-pasar tradisional di wilayah Kabupaten Kediri. Ciri-ciri dari pasar tradisional adalah letaknya yang strategis, dimana sebagian besar pasar tradisional terletak dekat wilayah pemukiman, biasanya komoditi yang diperdagangkan adalah komoditi kebutuhan hidup sehari-hari, di pasar-pasar tradisional masih ada budaya tawar menawar dalam proses jual beli. Hal inilah yang menjadi ciri khas pasar tradisional yang tidak dapat dijumpai pada pasar-pasar modern karena proses tawar menawar tersebut sudah ada semenjak timbulnya pasar sehingga menjadi budaya tersendiri bagi pasarpasar tradisional serta kondisi fisiknya yang terkesan tidak terawat seperti kotor, bau dan becek apabila hari hujan.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional disebutkan tentang ciri-ciri pasar tradisional ialah:

1. Dimiliki, dibangun dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli.
3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenisnya seperti pedagang sayur, bumbu, ikan, buah, dan daging.
4. Berbahan dasar lokal baik dari barang maupun jasa yang ditawarkan.

Merupakan hasil bumi yang dihasilkan dari daerah tersebut, meskipun

terdapat beberapa yang diambil dari daerah lain yang tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimpor.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian kualitatif menurut Sarwono (2006) adalah “suatu proses untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam berbagai kompleksitas yang ada yang terjadi pada interaksi manusia”. Proses dalam penelitian kualitatif mengharuskan peneliti berfokus pada prosesnya dari pada hasil. Proses memerlukan waktu dan kondisi yang selalu berubah berdampak pada desain riset dan cara-cara pelaksanaannya juga berubah (fleksibel). Melalui metode penelitian kualitatif ini, peneliti dapat mengungkapkan bagaimana pemberdayaan pedagang pada pasar tradisional di Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan citra dari pasar tradisional.

Dengan melihat tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang diuraikan di atas, penelitian kualitatif diperlukan untuk memberikan data yang bersifat deskriptif yang berupa penjelasan lisan dan kata-kata dari objek penelitian, dengan latar belakang pemberdayaan pedagang pasar tradisional di Kabupaten Kediri dan faktor-faktornya. Kesimpulan dari jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif disamping dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil dapat juga digunakan untuk mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi yang terjadi di dalam sebuah peristiwa melalui teknik pengumpulan data tertentu.

## B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus bertujuan untuk memberikan pedoman bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan sehingga penelitian dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Fokus yang tepat diperlukan karena berhubungan dengan data yang akan diperlukan dan data yang tidak diperlukan walaupun menarik secara materi namun tidak relevan dengan topik.

Yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Pemberdayaan pedagang pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan citra pasar tradisional, dilihat dari:
  - a. Meningkatkan profesionalisme pengelola yang meliputi:
    - 1) Penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar
    - 2) Penerapan manajemen yang profesional;
    - 3) Pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
    - 4) Ketersediaan standar operasional dan prosedur.
  - b. Meningkatkan kompetensi pedagang pasar yang meliputi:
    - 1) Pembinaan disiplin pedagang dan pembeli
    - 2) Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli; dan
    - 3) Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
    - 4) Memahami perilaku pembeli.
  - c. Meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar yang meliputi:

- 1) Pembenahan tata letak
  - 2) Pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
  - 3) Peningkatan kualitas konstruksi;
  - 4) Pembenahan sistem air bersih dan limbah;
  - 5) Pembenahan sistem elektrik;
  - 6) Penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
  - 7) Pembenahan sistem penanganan sampah.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan pedagang pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan citra pasar tradisional, dilihat dari:
- a) Faktor pendukung
  - b) Faktor penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kediri, dengan lebih fokus pada pemberdayaan pedagang pasar tradisional di Pasar Wonokerto di Jl. Bolowono, Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.

Guna mendukung pemahaman peneliti mengenai permasalahan yang hendak diteliti dan menunjang pengumpulan data yang lebih akurat, peneliti menetapkan situs penelitian di Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kediri.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Pengumpulan data bisa menggunakan dua sumber data yang berbeda yaitu sumber data utama atau primer dan juga sekunder. Sumber data primer ialah



sumber data dimana data tersebut secara langsung diberikan kepada pengumpul data, sedang sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan datanya contohnya ialah melalui orang lain. Foto atau melalui dokumen.

Mengacu pada uraian di atas maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder dijelaskan dibawah ini:

a. Data primer

Dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber sebagai informan yang diwawancarai dan diamati. Informan awal ditentukan oleh peneliti didasarkan pada subjek yang terlibat langsung dalam pemberdayaan pasar tradisional. Selanjutnya data primer juga diambil dari peristiwa yang terjadi atau fenomena yang terjadi pada peningkatan dan pengembangan pasar tradisional, dan juga dokumen-dokumen dari lokasi penelitian berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen ini merupakan catatan dari penulis yang sudah disiapkan untuk mencatat peristiwa dalam penelitian, dokumentasi, serta catatan tambahan pada saat wawancara dilaksanakan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, literatur, majalah ilmiah, jurnal, makalah, dan dokumen-dokumen lain berupa laporan-laporan dan hasil penelitian orang lain yang mempunyai korelasi erat dengan penelitian ini serta berbagai

dokumen yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri yang mempunyai relevansi dengan fokus penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang diperoleh dari subjek penelitian. Dengan demikian sesuai dengan fokus penelitian maka data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Informan, merupakan individu yang memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam memilih informan, peneliti wajib memahami peran dan posisi informan terhadap topik yang akan diteliti kemungkinan akses dan akurasi informasinya sesuai dengan kebutuhan informasi, informasi awal diperoleh melalui *key informan* sebagai informasi awal. Pemilihan ini didasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan. Informan yang dipilih dianggap sebagai orang yang berada dalam latar penelitian sehingga memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, yaitu yang berkaitan dengan masalah fokus penelitian. Selanjutnya yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian**

No	Informan
1	Kepala Dinas Perdagangan Beserta Jajarannya
2	Kepala UPT Pasar Kediri
3	Pedagang Pasar Wonokerto
4	Masyarakat

Tabel 3.1 Daftar Informan

Pemilihan informan selanjutnya didasarkan atas *snowball sampling technique*, dalam arti apabila dengan menambah informan yang diperoleh hanya informasi yang sama, berarti jumlah informan sudah cukup karena informasi dari informan terakhir sudah jenuh.

- b. Dokumen dan arsip. Dokumen merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu, tidak hanya tertulis tetapi juga bisa berupa rekaman dan bahkan berupa gambar. Adanya dokumen yang digunakan untuk sumber data karena dokumen memiliki informasi sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menafsirkan, melakukan uji, data yang didapat dari wawancara maupun observasi, dengan kata lain dokumen memegang peranan penting dalam penelitian ini guna memperkuat dan mendukung fakta-fakta empirik. Adapun dokumen dalam penelitian yang digunakan ini adalah notulen wawancara dari para informan dan buku lain yang sejenis, data Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021, Kediri Dalam Angka (KDA) Tahun 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, rencana strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
- c. Tempat dan peristiwa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka untuk memahami secara mendalam objek dan fenomena penelitian, peneliti perlu mencermati secara langsung berbagai peristiwa dan menjadikannya sebagai salah satu sumber data penelitian. Hasil pengamatan langsung ini akan dibandingkan atau dipadukan dengan data yang diperoleh dengan cara lain seperti data dari dokumen dan wawancara

dengan harapan data yang terkumpul akan lebih akurat. Peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat kondisi pasar wonokerto kemudian dibandingkan mengenai kesesuaian antara wawancara dan dokumen terkait.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Creswell (2012) menyatakan bahwa pengumpulan data ialah usaha memperoleh data melalui observasi dan wawancara, dokumentasi, materi visual, dan juga usaha merekam atau mencatat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah proses pencatatan perilaku subyek atau manusia, obyek atau benda, ataupun kejadian yang sistemis tanpa adanya berbagai bentuk komunikasi dengan individu yang diteliti. Teknik observasi dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi, yakni peneliti tidak melibat diri dalam lingkungan yang diamati sehingga peneliti hanya mengamati objek tersebut, peneliti hanya sebagai pengumpul data saja. Data yang dapat diamati dalam proses observasi dilakukan secara fleksibel melihat kondisi objek dan lokasi penelitian pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan semua panca indra yang dimiliki oleh peneliti dan disesuaikan dengan objek penelitian dan berlandaskan teori dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti menggunakan catatan lapangan yang merupakan catatan-catatan yang digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian dilapangan

termasuk wawancara dengan pedagang di Pasar Wonokerto. Instrumen ini digunakan agar peneliti terhindar dari kesalahan terhadap apa yang telah diamati.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian di kembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi maupun yang berada pada sentra industri rumah tangga yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini berupa foto-foto, dan berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Dokumentasi kegiatan peneliti berupa lembar pertanyaan, rekaman wawancara serta foto-foto. Dokumentasi ini diperoleh dari berbagai sumber baik dari lokasi maupun penelitian dan oleh sumber lainnya.

## F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam setiap penelitian ilmiah selalu diperlukan tolok ukur untuk melihat kebenaran hasil penelitian itu sendiri. Untuk penelitian kualitatif hal tersebut dinamakan keabsahan data, dimana diperlukan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data pada empat kriteria sebagai berikut (Sugiyono, 2009):

1. Derajat kepercayaan (*credibility*), teknik pemeriksaan keabsahan data pada kriteria derajat kepercayaan dapat dilakukan dengan cara: a) perpanjangan keikutsertaan, untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya dan untuk menyingkirkan distorsi baik dari diri sendiri maupun maupun informan dalam melakukan penelitian, peneliti tidak langsung melakukan pengumpulan data namun membangun kepercayaan dengan informan melalui wawancara terhadap *stakeholder* kunci serta observasi lapangan yang berkaitan dengan penelitian; b) ketekunan pengamatan, hal ini penulis hanya memfokuskan terhadap data-data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga data yang didapatkan lebih terarah dan relevan; c) triangulasi dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi dengan metode dilaksanakan melalui pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan teori dilaksanakan atas dasar anggapan bahwa fakta tertentu dapat diperiksa dengan derajat kepercayaan melalui satu atau lebih teori yang telah mapan yang dikemukakan oleh para teoritis sebagai penjelasan banding (*rival explanation*). Dalam triangulasi terdapat istilah data jenuh, artinya pengumpulan data dapat dihentikan oleh peneliti jika subjek-subjek yang diwawancara memberikan informasi yang sama maka hasilnya tetap konsisten sama (Idrus, 2007).
2. Keteralihan (*transferability*) sebagai persoalan empiris sangat tergantung pada kesamaan konteks antara pengirim dan penerima, untuk

melaksanakan keteralihan ini maka penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data, fakta dan informasi dalam konteks yang sama dengan seteliti dan secermat mungkin dengan mengacu pada fokus penelitian. Peneliti bertanggung jawab pada penyajian data deskriptif, data yang dimaksud berupa catatan lapangan, peraturan-peraturan, petunjuk pelaksanaan, laporan pelaksanaan dan hasil wawancara dengan informan.

3. Ketergantungan (*dependability*), hal ini berkaitan dengan konsistensi dari hasil penelitian, hasil analisa data penelitian harus segaris dengan data mentah dan hasil penafsiran dari data mentah tersebut.
4. Kepastian (*confirmability*) berasal dari konsep objektivitas, dalam penelitian kualitatif suatu objektivitas dapat dicapai dengan memperoleh konfirmasi dari beberapa orang tentang data yang diperoleh dari lapangan, selain itu untuk memeriksa apakah hasil penelitian ini benar atau salah, penulis juga akan mengkomunikasikan dengan komisi pembimbing, tahap demi tahap mengenai hasil penelitian lapangan.

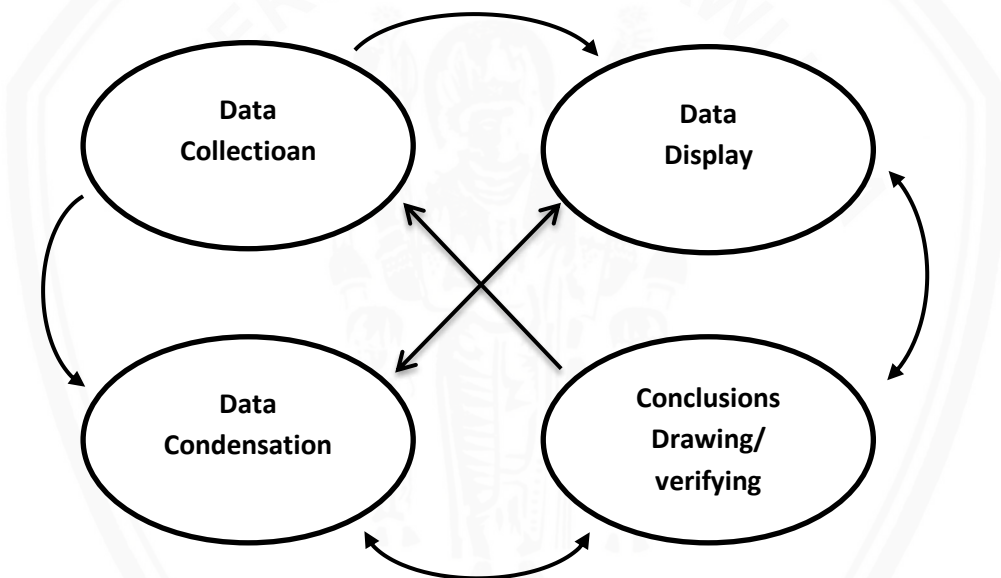
#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (2009) kemudian disempurnakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang membagi penelitian menjadi dua kegiatan yaitu pengumpulan data dan analisis data, kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama, saling terkait antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu interaksi dan berproses terus-menerus. Kegiatan analisa data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: kondensasi data, penyajian data dan



pemeriksaan kesimpulan / verifikasi, kegiatan analisis dapat dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data sebagaimana disajikan.

Kegiatan pengumpulan dan ketiga kegiatan analisis data merupakan empat sumbu yang bergerak bolak-balik antar satu tahap dengan tahap yang lain. Tahap pra-analisa dimulai dari proses pengumpulan data, dimana data berwujud kata-kata yang didapat melalui observasi, wawancara, dokumen atau dokumentasi yang dikumpulkan selanjutnya diproses untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan. Gambaran tentang siklus tersebut disajikan gambar 3.1:



Gambar 3.1 : Komponen-komponen Analisa Data: Model Interaktif. Miles, Huberman dan Saldana (2014)

Lebih lanjut Miles, Huberman dan Saldana (2014) menjelaskan ketiga alur kegiatan analisa data sebagai berikut:

1. Kondensasi data: sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya

kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal yang bersifat pokok, pemilihan pada hal yang penting, hal ini dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan selama proses penelitian berjalan dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh dilapangan.

2. Penyajian data: pada tahap ini, informasi yang telah dikumpulkan dan direduksi sesuai dengan fokus yang telah ditentukan, dikelompokkan, disusun dan disajikan dalam bentuk grafik atau bagan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap sebuah peristiwa yang terjadi. Proses penyajian data erat kaitannya dengan proses penarikan kesimpulan / verifikasi karena, semakin baik dalam menyajikan data akan semakin kaya sebuah deskripsi dan berimbas pada penarikan kesimpulan yang lebih baik. Pada saat awal data disajikan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan deskripsi terhadap data tersebut, deskripsi ini akan menguat ketika kemudian dikaitkan dengan data yang lain dan dicari hubungan antar data itu, demikian seterusnya sampai dengan diperoleh penjelasan yang jelas.

3. Penarikan kesimpulan: yaitu dengan memverifikasi sepanjang proses penelitian berlangsung. Peneliti berupaya untuk menganalisis, mendapatkan pola, hubungan persamaan, tema, hal yang sering timbul, hipotesis dan lainnya yang dituangkan dalam kesimpulan tentatif yang sebelumnya didapat dari penyajian data, proses verifikasi berlangsung secara terus menerus, sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Pasar Wonokerto Kabupaten Kediri

###### a. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kediri yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Kediri terletak pada posisi  $111^{\circ} 47' 05''$  sampai dengan  $112^{\circ} 18' 20''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 36' 12''$  sampai dengan  $8^{\circ} 0' 32$  Lintang Selatan. Batas wilayah di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk. Di sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang. Disebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang. Di sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kediri sekitar 1.386,05  $\text{KM}^2$  dan terbagi menjadi 26 kecamatan, 1 kelurahan dan 343 desa.



Gambar 4.1: Peta Wilayah Kabupaten Kediri  
(sumber: website [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id))

Nama Pasar Wonokerto berasal dari nama tempat pasar tersebut yang berada pada desa wonokerto. Pasar wonokerto berdiri sejak sekitar tahun 1940an dan termasuk pasar tertua di Kabupaten Kediri. Pasar Wonokerto terletak pada pusat keramaian yang strategis di Kabupaten Kediri, yang memiliki daya tampung berkisar 10.000. hal ini lah yang menyebabkan Pasar Wonokerto menjadi salah satu pasar terbesar dan ditunjang dengan lengkapnya barang yang diperdagangkan pada pasar ini. Pasar Wonokerto beroperasi selama 24 jam dan pasar ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pasar pagi, pasar siang, dan pasar sore.

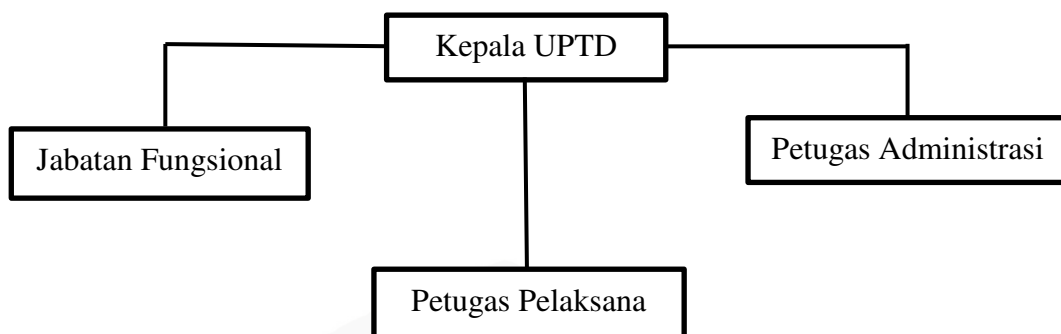
Luas tanah Pasar Wonokerto ialah 32.581 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan seluas 23.248 m<sup>2</sup>. Saat ini total terdapat 1.263 pedagang yang menjajakan dagangannya di Pasar Wonokerto. Kondisi Pasar Wonokerto saat ini terkesan kumuh, dengan penataan pedagang yang kurang baik, berbau dan jika hujan maka jalan di pasar menjadi becek, hal ini dikarenakan kondisi drainase yang buruk dan juga masih belum adanya tempat pembuangan sampah (TPA) yang memadai. Hal ini yang menjadi kekurangan dari Pasar Wonokerto. (sumber penulis

## **b. Profil kantor Pasar Wonokerto Kabupaten Kediri**

### **1) Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Pasar Wonokerto memiliki fungsi yang sama dengan struktur organisasi pada umumnya, yang pada dasarnya adalah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Struktur kepengurusan langsung di bawah naungan Dinas Perdagangan sehingga pegawai yang bekerja tergolong Pegawai Negeri Sipil (PNS). Organisasi pengelola pasar dinamakan Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Pasar Wonokerto. Adapun struktur kepengurusannya adalah:

Gambar 4.2: Struktur Organisasi Pasar Wonokerto Tahun 2018



Tabel 4.1 Nama dan Jabatan Pegawai Di Pasar Wonokerto Tahun 2018

No	Nama	Jabatan
1	Sumarno	Kepala UPTD
2	Giran	Petugas Administrasi
3	Santoso	Petugas Administrasi
4	Rusmani	Petugas Administrasi
5	Aziz	Petugas Administrasi
6	Sumadi	Petugas Administrasi
7	Moerif	Petugas Administrasi
8	Rowi	Petugas Retribusi
9	Baroq	Petugas Retribusi
10	Budi	Petugas Retribusi
11	Hari	Petugas Retribusi
12	Istadi	Petugas Retribusi
13	Tris	Petugas Retribusi
14	Slamet	Petugas Retribusi
15	Gino	Petugas Retribusi
16	Sumino	Petugas Retribusi
17	Danton	Petugas Retribusi
18	Sutikno	Petugas Retribusi
19	Nurhadi	Petugas Retribusi
20	Wiyono	Petugas Retribusi
21	Sunarto	Petugas Retribusi

Sumber: Data sekunder dari UPTD Pasar Wonokerto diolah oleh peneliti (2018)

Dari struktur organisasi di atas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan orang yang menjalankan sistem operasional Pasar Wonokerto adalah 21 orang, satu orang bertugas sebagai kepala UPTD, 6 orang bertugas sebagai petugas administrasi, 14 orang bertugas sebagai petugas retribusi. Dari ketiga

bagian tersebut tidak ada satu orangpun yang memiliki jabatan ganda dengan tujuan supaya orang tersebut lebih maksimal dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang mereka emban sekarang. Mereka semua berusaha untuk bertanggung jawab dan giat dalam menjalankan aktifitasnya di Pasar Wonokerto Kabupaten Kediri.

## **2) Job Description**

### **→ Kepala UPTD**

Tugas: mempunyai wewenang tertinggi dan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan operasional. Sehingga seluruh kegiatan dan kejadian yang ada di pasar tersebut adalah menjadi tanggung jawab kepala UPTD.

### **→ Jabatan Fungsional**

Tugas: melaksanakan pengelolaan administrasi seperti pendapatan hasil pemungutan retribusi dan mengadakan laporan setiap bulannya pada pemerintah daerah Kabupaten Kediri

### **→ Petugas Retribusi**

Tugas: melaksanakan pemungutan retribusi sampah, pemungutan pajak, pengelolaan parkir di pasar dan sekaligus sebagai petugas kebersihan.

### **→ Petugas Administrasi**

Tugas: mencatat dan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke kas daerah, serta mengadministrasikan sirkulasi pemungutan retribusi.

## **3) Profil Pedagang Pasar Wonokerto**

Pedagang yang berada di Pasar Wonokerto terdiri dari berbagai daerah kawasan Kabupaten Kediri, terdapat beberapa jenis dagangan yang diperjual



belikan oleh para pedagang yang berada di Pasar Wonokerto. Saat ini terdapat setidaknya 1000 lebih jumlah pedagang yang menempati kios sebanyak 314 kios di Pasar Wonokerto. Kios yang terdapat di Pasar Wonokerto memiliki ukuran yang berbeda beda, mulai dari yang paling kecil 3m<sup>2</sup> hingga 20m<sup>2</sup>. Hal ini juga mempengaruhi besaran biaya retribusi pedagang.

**Tabel 4.2 Jenis dan Jumlah Pedagang**

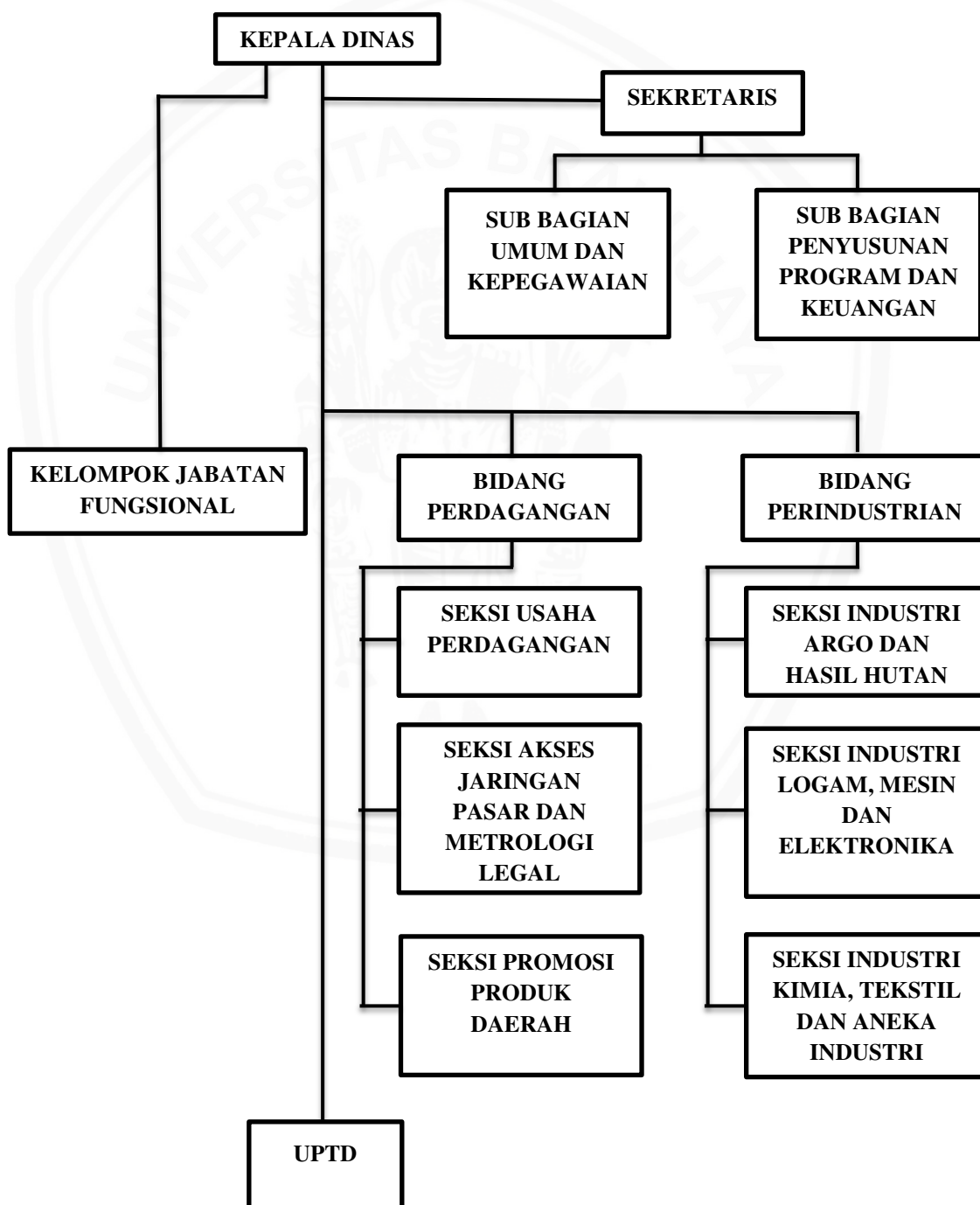
No	Jenis Dagangan	Jumlah Kios
1	Sayur	58
2	Pracang	47
3	Daging	15
4	Ayam	19
5	Kain	31
6	Warung	28
7	Buah	26
8	Bumbu	33
9	Ikan	17
10	Jajan	12
11	Lain-lain	28
	Jumlah	314

Sumber: Data Olahan Penulis (2018)

## 2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri

Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri antara lain:

### a. Struktur Organisasi



**b. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perdagangan**

1. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan usaha perdagangan, akses jaringan pasar dan metrologi legal dan promosi produk daerah.
2. Kepala Bidang Perdagangan Menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis perdagangan;
  - b) Penyusunan perencanaan program perdagangan;
  - c) Penyusunan petunjuk teknis dalam mendukung pengembangan sarana perdagangan;
  - d) Penyiapan dan penyebaran informasi peluang pasar dan promosi produk daerah;
  - e) Pemantauan dan pengevaluasian perkembangan harga secara berkala dan operasi pasar dalam rangka pengendalian harga serta inflasi;
  - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perdagangan;
  - g) Pengoordinasian integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program di bidang perdagangan;
  - h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang perdagangan; dan
  - i) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Perdagangan.
3. Kepala Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan usaha perdagangan dalam dan luar negeri.

4. Kepala Seksi Akses Jaringan Pasar dan Metrologi Legal mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana kegiatan akses jaringan pasar dan metrologi legal.
5. Kepala Seksi Promosi Produk Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program rencana kegiatan promosi produk daerah, pasar lelang, pasar online serta penyiapan sarana promosi produk daerah dalam rangka pengembangan pemasaran produk daerah.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional**

#### **a. Penguatan Pedagang Pasar Tradisional**

##### **1) Sosialisasi**

Mayoritas masyarakat Kabupaten Kediri yang masih bercirikan masyarakat tradisional, yaitu mereka yang masih menjunjung nilai-nilai lokal tentunya keberadaan pasar tradisional sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Akan tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin maju dimana daerah mulai mengadopsi nilai-nilai modern, tentunya masyarakat akan semakin terbuka pemikirannya dan akan mulai beralih menuju modernitas. Dengan demikian keberadaan pasar tradisional juga dituntut untuk berubah sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. Dengan berbagai permasalahan yang muncul pada pasar tradisional mulai dari permasalahan yang diakibatkan pihak eksternal pasar maupun pihak internal pasar yang menjadikan citra pasar tradisional menjadi lebih

buruk, untuk itu dibutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan citra pasar tradisional, hal ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan pedagang pasar tradisional.

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan telah melakukan beberapa hal untuk pemberdayaan pasar, lebih khusus Pasar Wonokerto yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Kediri, yaitu salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada pedagang pasar tradisional. Sosialisasi dilakukan dalam rangka memberikan wawasan kepada pedagang pasar lebih khusus pada pedagang ayam dan daging, yaitu dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan akan bahaya daging gelonggongan dan ayam yang tidak sehat beserta ciri-cirinya. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, yaitu:

“Kami telah melakukan langkah-langkah untuk pemberdayaan pedagang salah satunya adalah memberikan wawasan kepada pedagang yang berbentuk sosialisasi, terutama bagi para pedagang daging baik sapi maupun ayam, yaitu kita menjelaskan bahaya tentang daging gelonggongan, ciri-ciri daging sapi yang tidak sehat, dan juga ayam yang tidak sehat. Hal ini kami lakukan agar para pedagang dalam berdagang bisa lebih aman, mereka mencari uang jangan sampai terkena perkara hukum dikarenakan menjual daging gelonggongan dan ayam yang tidak sehat.” (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala UPTD Pasar Wonokerto, beliau menyampaikan bahwa salah satu upaya pemberdayaan kepada pedagang adalah dengan memberikan wawasan berupa sosialisasi kepada pedagang daging dan ayam hal ini seperti yang beliau sampaikan:

“Yang rawan itu pas hari raya mas, biasanya banyak beredar daging yang kualitasnya buruk baik itu daging sapi maupun daging ayam, untuk itu kita memberikan sosialisasi sebagai tambahan wawasan kepada para pedagang agar lebih berhati-hati lagi dalam menjual barang-barang dagangannya.” (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2018)

Kemudian peneliti mencoba mencari kebenarannya pada beberapa pedagang daging dan ayam yang ada di Pasar Wonokerto. Hal ini dibenarkan oleh pedagang daging maupun ayam yang ada di Pasar Wonokerto, salah satunya adalah pernyataan dari pedagang ayam yang peneliti wawancarai, beliau menyatakan:

“Ya mas, kita dikumpulkan oleh petugas, kemudian kita diberikan masukan-masukan yang intinya kita diberi tahu bagaimana ciri-ciri daging gelonggongan dan juga daging ayam yang tidak sehat untuk dikonsumsi, alhamdulillah pemerintah juga ada perhatian ke kita karena tidak sedikit diluar sana yang melakukan kecurangan, namun untuk Pasar Wonokerto ini insya Allah aman mas, kita semua sudah mendapatkan wawasan dari pemerintah sehingga kita kalau mau kulakan juga akan lebih berhati-hati lagi.” (Wawancara pada tanggal 27 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya salah satu bentuk pemberdayaan dalam hal penguatan pedagang pasar adalah dengan memberikan sosialisasi kepada pedagang daging dan ayam berkaitan dengan kualitas daging yang baik, baik daging sapi maupun daging ayam yang layak untuk diperdagangkan. Hal ini juga diharapkan agar pedagang terbebas dari permasalahan hukum yang banyak menjerat pelaku-pelaku curang yang membuat daging gelonggongan yang marak terutama mendekati hari raya.

## **2) Pengarahan Informal**

Kelebihan yang dimiliki oleh pasar modern salah satunya adalah pasar modern memiliki tim analisis pasar yang mampu untuk memetakan kekuatan dan kelemahan serta berbagai strategi dan juga apa yang dibutuhkan mereka untuk

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu upaya dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan adalah dengan memberikan bimbingan yang berupa pengarahan secara informal kepada pedagang-pedagang yang ada di Pasar Wonokerto. Pengarahan tersebut adalah berupa arahan tentang cara-cara berjualan untuk para pedagang, hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sebagai berikut:

“Ya mas salah satu kelemahan pedagang sendiri adalah mereka kurang bisa mengelola dagangannya, seperti hal nya mereka tidak memikirkan kualitas barang yang mereka perdagangkan, menata dagangannya tidak rapi, tidak punya keahlian dalam mengelola keuangannya, barang dagangan yang tidak higienis sehingga calon pembeli pun merasa tidak tertarik. Ya untuk itu kita datangi mereka di kios-kios, kita ingatkan dan kita beri arahan cara berjualan agar para pengunjung atau calon pembeli itu tertarik mas untuk membeli dagangan mereka.” (Wawancara tanggal 23 Februari 2018)

Hal ini pun dibenarkan oleh beberapa pedagang yang ada di Pasar Wonokerto, bahwasannya mereka pun menyadari akan kelemahan tersebut yang mereka miliki. Para pedagang merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan saat ini dan kurang memiliki kemauan untuk berbenah diri lebih baik lagi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh seorang pedagang sembako di Pasar Wonokerto sebagai berikut:

“Petugas ya beberapa hari sekali keliling pasar mas, kadang ada petugas dari dinas perdagangan yang keliling pasar, mereka ya memberikan arahan kepada kita agar dagangannya lebih bersih lagi, perlu diperhatikan tata letak barang dagangannya agar lebih enak dipandang, dan tidak menyimpan barang-barang yang sudah tidak layak lagi di kios maupun di samping kanan kiri kios. Ya kita terima masukan dari mereka, karena mereka memahami kelemahan dari pedagang-pedagang seperti kita ini, *wong* kita ini SD aja enggak tamat, yang penting dapat uang mas, bisa mencukupi kebutuhan



sehari-hari dan anak-anak maupun cucu sekolahnya lebih tinggi daripada kita.” (Wawancara tanggal 27 Februari 2018)

Kelemahan ini yang ditanggapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri selaku pihak pengelola pasar, pemerintah menyadari akan perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh para pedagang, karena dengan semakin kuatnya persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern, dimana pasar modern memiliki standarisasi dalam menyaring pegawai. Namun terdapat kesulitan yang dialami pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh pedagang Pasar Wonokerto, hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, yaitu:

“kita menyadari mas kelemahan-kelemahan yang ada di pasar tradisional, salah satunya adalah kualitas SDM pedagang yang rendah, hal ini diakibatkan karena mayoritas dari mereka adalah berpendidikan rendah yang kebanyakan tidak tamat sampai SMP. Mereka para pedagang juga tidak memiliki keinginan kuat untuk menjadi lebih baik lagi mas, mereka merasa nyaman dan cukup dengan apa yang ada pada diri mereka saat ini. Hal lain yang membuat kita kesulitan adalah dengan banyaknya jumlah pedagang Pasar Wonokerto yang mencapai ratusan dengan berbagai latar belakang yang terkadang ada yang seenaknya sendiri, hal ini menjadi salah satu kesulitan dari Dinas Perdagangan untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang mas.” (Wawancara tanggal 23 Februari 2018)

### **3) Ketertiban**

Dengan melihat secara keseluruhan tentang pasar tradisional, maka keberadaan pasar tradisional tidak hanya dipandang sebelah mata saja atau hanya dipandang pada sisi negatif saja. Pasar tradisional juga memiliki berbagai kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan pasar modern. Salah satunya ialah terdapatnya potensi ekonomi yang tinggi.

Pasar tradisional baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada peningkatan ekonomi masyarakat yang berhubungan langsung dengan pasar maupun secara tidak langsung yang berhubungan dengan pasar tradisional. Seperti halnya ialah mereka yang berprofesi sebagai petani, peternak, dan lain sebagainya muara dari hasil yang mereka kelola ialah pada pasar tradisional. Dengan potensi ekonomi yang menguntungkan para pedagang tersebut, tentunya sudah seharusnya pedagang juga menjaga pasar agar pasar tetap nampak rapi dan bersih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk pemberdayaan pedagang yang dilakukan Dinas Perdagangan adalah dengan menjaga ketertiban pedagang yaitu Dinas Perdagangan telah mengatur *zoning* atau pos-pos penempatan pedagang berdasarkan barang yang diperdagangkan, seperti contohnya adalah pedagang buah berada satu tempat dengan pedagang buah, hal ini dilakukan agar nampak lebih rapi dan memudahkan pengunjung untuk menemukan barang-barang yang dibutuhkan oleh pengunjung pasar. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, sebagai berikut:

“Kalau kita masuk di pasar itu mas, pasar-pasar tradisional itu terkadang pedagang daging dan pedagang kain itu campur tempatnya, kan jadinya akan ada salah satu yang kalah ataupun membuat pemandangan kurang enak mas. Kalau pedagang ikan disampingnya pedagan buah, nanti dikhawatirkan pengunjung tidak tertarik karena baunya tidak enak. Untuk itu kita mengatur *zoning* pedagang mas berdasarkan jenis dagangan yang diperdagangkan, jika buah ya sama buah, sayur sama sayur...” (Wawancara tanggal 23 Februari 2018)

Saya mewawancarai salah seorang petugas lapangan yang saat itu berada di Pasar Wonokerto, beliau menyatakan bahwa dengan adanya *zoning* ini maka

tampilan pasar nampak lebih indah, rapi dan juga bagi pemerintah sendiri akan lebih mudah dalam mengatur ketertiban pedagang pasar dibandingkan ketika pasar sebelum revitalisasi. Hal ini seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“Pasar Wonokerto ini tahun 2015 mulai direvitalisasi mas, mulai dari fisik pasarnya yang banyak berbenah, penambahan-penambahan fasilitas, dan lainnya juga dari penataan pedagang juga. Dulu sebelum revitalisasi penataan pedagang cenderung acak, pedagang penempatannya tidak diatur sedemikian rupa. Namun setelah revitalisasi sekarang diatur mas, pedagang buah ya satu wilayah dengan pedagan buah, daging sama daging. Selain itu ya keuntungannya bagi kita, kita jadi lebih mudah mengatur pedagang.” (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2018)

Dengan adanya pernyataan dari Kepala Bidang Perdagangan dan salah satu petugas lapangan dari Dinas Perdagangan, hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan salah satu pedagang ayam yang berada di Pasar Wonokerto sebagai berikut:

“Ya mas, memang kita dulu itu terkadang berjualan ada didepan pasar, di parkir pasar, tapi sekarang semua pedagang ayam diberikan satu tempat disini, jadi tempatnya bau ayam disini, sekarang jadi lebih mudah ditempat ini juga disediakan tempat pemotongan ayam, jadi kalau ada pembeli yang ingin membeli ayam dalam keadaan segar ya justru lebih enak disini langsung dipotong dan dibubut.” (Wawancara pada tanggal 27 Februari 2018)

Selain mengatur *zoning* bagi para pedagang, salah satu bentuk pemberdayaan pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan citra pasar tradisional ialah dengan menjaga kebersihan pasar, dimana salah satu citra buruk yang melekat pada masyarakat ialah pasar tradisional yang terkesan kumuh dan berbau tidak sedap, tentunya hal ini dikarenakan kurang terjaganya kebersihan yang ada pada pasar tradisional. Hal ini nampak dari aktifitas petugas Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja sama dengan UPTD Pasar Wonokerto dalam menertibkan pedagang.

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu petugas dinas Pasar Wonokerto yang peneliti Wawancarai, beliau menjelaskan akan pentingnya penertiban pedagang dalam hal kebersihan dikarenakan banyaknya tingkah laku buruk pedagang yang membuang sampah sembarangan, hal ini juga dilakukan oleh para pengunjung pasar yang kurang perhatian atau peduli terhadap kebersihan dan keindahan pasar.

Berikut apa yang beliau sampaikan:

“Kita ini setiap pagi selalu menertibkan pedagang-pedagang mas, terkadang pembeli juga kami ingatkan. Mereka sering kali membuang sampah sembarangan. Kalau kebiasaannya seperti itu terus ya jadi jelek pasarnya, jadi ya harus tumbuh kesadaran dari semua orang yang ada disini mas, baik pedagangnya, pembeli, maupun petugasnya.” (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2018)

Dari tinjauan keadaan berupa dokumentasi dan wawancara, maka salah satu bentuk pemberdayaan pasar tradisional khususnya Pasar Wonokerto adalah dengan adanya penertiban pedagang pasar berdasarkan jenis barang dagangannya atau *zoning*, dan juga penertiban kebersihan yang dilakukan oleh petugas dinas Pasar Wonokerto bekerjasama dengan Satpol PP.

#### **4) Paguyuban Pasar**

Potensi yang dimiliki oleh pasar tradisional juga berkaitan dengan potensi sosial, dimana pasar tradisional merupakan tempat berkumpulnya banyak orang yang saling berinteraksi satu sama lain, walaupun hanya untuk sekedar saling sapa ataupun untuk saling menceritakan tentang kejadian-kejadian yang sedang terjadi dikalangan masyarakat maupun yang sedang *viral* pada saat itu, dan juga untuk

menyampaikan informasi-informasi antar masyarakat. Tentunya dengan adanya interaksi sosial yang terjalin dengan baik akan menciptakan hubungan sosial masyarakat yang baik. Pasar merupakan ruang penampakan wajah asli masyarakat yang saling bergantung karena saling membutuhkan. Riuhnya pasar karena canda tawa, dan nilai-nilai kultural yang ada di masyarakat dapat di potret dalam keseharian mereka dipasar.

Untuk itu dengan dibentuknya suatu paguyuban Pasar Wonokerto, yang beranggotakan para pedagang Pasar Wonokerto, hal ini akan semakin memperkuat hubungan antar pedagang, selain itu salah satu fungsi adanya paguyuban pasar ini juga menjadi suatu wadah saling berbagi informasi baik mengenai program-program pemerintah maupun berkaitan langsung dengan aktivitas jual beli para pedagang, dengan adanya paguyuban pedagang pasar ini maka salah satu keuntungan lain yang didapat oleh pedagang adalah pedagang bisa meminjam dana modal pada paguyuban dan juga distribusi barang kepada pedagang yang membutuhkan semakin mudah. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, yang menyampaikan sebagai berikut:

“..hal lain kita juga membuat paguyuban pasar mas, yang menaungi pedagang-pedagang Pasar Wonokerto, banyak aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam paguyuban pasar ini, maka pemerintah dalam mensosialisasikan program jadi lebih mudah, salah satunya ialah program revitalisasi kemarin kita bekerja sama dengan paguyuban pasar dimana dalam program revitalisasi pasar terdapat beberapa pedagang yang menolak revitalisasi karena takut dagangannya sepi, maka kita dengan paguyuban pasar bersama-sama melakukan sosialisasi. Selain itu, dikarenakan kita belum memiliki koperasi pedagang, maka dengan adanya paguyuban pasar ini pedagang antar individu bisa saling pinjam meminjam dan juga saling

berbagi informasi, dan lain sebagainya.” (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

Dari apa yang dipaparkan diatas maka salah satu bentuk pemberdayaan pedagang pasar ialah dengan membentuk paguyuban pasar yang berangotakan para pedagang pasar tradisional, dimana dalam paguyuban pasar tersebut para pedagang bisa saling berbagi informasi dan juga bagi para pedagang yang membutuhkan permodalan maka secara personal mereka bisa saling pinjam meminjam, selain itu dengan adanya paguyuban pasar maka pemerintah menjadi lebih mudah dalam mensosialisasikan program-programnya.

#### **b. Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional**

##### **1) Surat Ijin Usaha (SITU)**

Kepastian menjadi salah satu aspek yang penting bagi pedagang di Pasar Wonokerto, karena dengan jumlah pedagang yang sangat banyak, tidak jarang terkadang muncul rasa iri antar pedagang dengan adanya penempatan pedagang yang terkadang ada yang mendapatkan tempat yang enak dan yang kurang enak untuk berdagang. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) sebagai Kepastian hukum bahwa pedagang tersebut bisa berdagang pada tempat yang telah ditetapkan.

SITU merupakan kepastian hukum yang berkaitan dengan perizinan pemanfaatan tempat usaha, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, yang juga diatur dalam peraturan daerah. Di Kabupaten Kediri sendiri, SITU diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012. Konsekuensi dengan penertiban SITU bagi pedagang, maka pedagang diwajibkan untuk membayar



biaya retribusi kepada pemerintah daerah. Kepala Bidang Perdagangan saat itu menjelaskan:

“Ya untuk perlindungan pedagang para pedagang di Pasar Wonokerto, kita mengeluarkan yang dinamakan SITU atau surat ijin tempat usaha. Dengan adanya SITU tersebut maka ini sebagai kepastian hukum bagi para pedagang, sehingga dengan adanya SITU pedagang memiliki hak untuk kios-kios untuk berdagang, sehingga tidak ada pedagang lain yang bisa mengklaim bahwa kios tersebut miliknya.” (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dinyatakan bahwa salah satu bentuk perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional di Pasar Wonokerto adalah dengan adanya Surat Ijin Tempat Usaha tersebut.

## **2) Zonasi Pasar Tradisional dan Modern**

Dalam era saat ini persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern tidak dapat dihindari, tentunya dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Akan tetapi masyarakat yang semakin modern cenderung memilih pasar modern. Pemerintah daerah Kabupaten Kediri telah mengatur *zonasi* antara pasar tradisional dan pasar modern, hal ini bertujuan untuk menjaga keberadaan dan keberlangsungan pasar tradisional serta untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern yang berkembang cukup pesat.

Dari hasil penelitian melalui observasi, penelusuran dokumen dan wawancara diketahui bahwa jarak yang diatur dalam peraturan daerah tentang perlindungan pasar tradisional ialah 1000m terbebas dari pembangunan pasar modern. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri yang menjelaskan bahwa:



“Kita sudah mengatur mas untuk pembangunan pasar modern itu jaraknya ialah satu kilometer dari pasar tradisional. Ya kalau terlalu berdekatan dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan pasar tradisional dan juga toko-toko kecil yang ada disekitar pasar modern. Hal ini sebagai cara untuk melindungi pasar tradisional khususnya Pasar Wonokerto dan pedagang-pedagang kelontong maupun kaki lima yang ada di sekitar Pasar Wonokerto.” (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dalam Pasal 8 ayat 1 telah mengatur bahwa dalam radius 1000m tidak diperkenankan untuk dibangun pasar modern.

### **3) Jam Pelayanan Pasar Tradisional dan Modern**

Salah satu bentuk dari perlindungan pedagang pasar tradisional adalah dengan membedakan jam pelayanan antara pasar tradisional dan pasar modern. Akan tetapi hal ini secara umum berlaku pada pasar-pasar tradisional yang berada di Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tertuang pada Pasal 9 ayat 1 dan 3 dijelaskan bahwa pasar modern berjenis Hypermarket, Supermarket, dan lain sebagainya yang semisalnya beroperasi mulai pukul 10.00-22.00 WIB, sedangkan pada minimarket beroperasi mulai pukul 07.00-24.00 WIB, hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan operasi pasar tradisional yang beroperasi pada umumnya dini hari hingga siang hari, sehingga para pembeli dapat mengawali berbelanja kebutuhannya pada pasar tradisional. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala UPTD Pasar Kediri, yang menjelaskan bahwa:

“Nah untuk itu kita melindungi pedagang pasar tradisional khususnya yang berada di Pasar Wonokerto ini mas, kita terdapat peraturan yang mengatur tentang jam pelayanan pasar. Kalau kita sejak dini hari sudah buka, sehingga orang-orang kalau butuh sesuatu bisa mengawali ke pasar tradisional dulu sebelum ke pasar modern.” ( Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Bidang Perdagangan yang menjelaskan bahwa dengan perbedaan jam pelayanan antara pasar tradisional dan pasar modern, hal ini dilakukan untuk melindungi serta menjaga keberlangsungan pedagang Pasar Wonokerto. Beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan aktivitas jual beli pedagang Pasar Wonokerto, kita ada peraturan berkaitan dengan perbedaan jam pelayanan antara pasar tradisional dan pasar modern mas, untuk pasar tradisional sudah beroperasi sejak dini hari hingga menjelang siang hari, sedangkan pasar modern mulai beroperasi menjelang siang hari hingga malam hari. Karena dengan begitu masyarakat yang membutuhkan barang-barang bisa lebih pagi berbelanja di pasar tradisional.” (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

### **c. Pemeliharaan Pedagang Pasar Tradisional**

#### **1) Pendirian Koperasi**

Pemeliharaan dalam hal ini pemberdayaan ialah dengan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Salah satu bentuk dari pemberdayaan pedagang Pasar Wonokerto dalam hal ini pemeliharaan adalah dengan adanya koperasi pasar, dimana koperasi pasar dapat menjadi pilihan alternatif bagi para pedagang Pasar Wonokerto yang membutuhkan modal untuk meningkatkan kualitas jual beli mereka, serta koperasi juga berfungsi sebagai sentra kulakan

yaitu koperasi memberikan fasilitas membeli barang-barang dari pedagang yang ada di Pasar Wonokerto untuk kemudian dijual lagi oleh koperasi.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, bahwa salah satu bentuk pemeliharaan pedagang pasar agar tetap dapat menjalankan roda perekonomiannya adalah dengan mendirikan koperasi pasar. Sebagaimana yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“...mayoritas mereka yang berjualan di Pasar Wonokerto itu masyarakat berkekuatan ekonomi lemah mas, mereka selalu membutuhkan dana untuk terus bertahan berjualan di pasar, hingga saat ini yang terjadi memang secara antar personal mereka saling pinjam meminjam, untuk itu kita sadar bahwa kita membutuhkan koperasi pasar yang bisa menjadi wadah bagi mereka yang membutuhkan modal dengan bunga yang sangat sedikit, selain itu koperasi kedepannya diharapkan menjadi sentra kulakan bagi para pedagang, jadi koperasi juga menerima barang-barang dagangan para pedagang untuk dijual lagi. Untuk saat ini memang belum terbentuk, namun kita sedang mempersiapkan infrastrukturnya mas.” (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan oleh salah seorang pedagang di Pasar Wonokerto, beliau menyampaikan bahwa dalam hal permodalan sampai saat ini masih menggantungkan pada pedagang lain yang dinilai memiliki kelebihan, beliau mengharapkan terdapat lembaga khusus dari pemerintah yang bisa memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah bahkan tanpa bunga. Hal ini sebagaimana yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“Wah kalau modal dari pemerintah itu tidak ada mas, pemerintah belum ngasih bantuan, bahkan untuk modal saja saya masih suka pinjam di pedagang lain yang lebih kaya. Namun kan yang namanya pinjam terus ya tidak enak mas, jadi ya kalau bisa itu ada lembaga khusus seperti bank atau koperasi yang bunganya rendah bagi para pedagang mas, kan kita itu mau kulakan lebih banyak juga butuh modal banyak juga, mau tempatnya lebih

bagus lagi ya kan butuh modal banyak juga.” (Wawancara pada tanggal 27 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui pentingnya permodalan bagi para pedagang Pasar Wonokerto, untuk itu pemerintah masih sedang dalam tahap pembangunan koperasi Pasar Wonokerto.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional oleh Pemerintah dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Revitalisasi Pasar Wonokerto**

Keberadaan pasar modern dengan berbagai kelebihanannya membuat masyarakat banyak beralih ke pasar modern, tentunya pemerintah sebagai pelayan masyarakat sudah selayaknya merespon keadaan ini dengan melakukan peningkatan kualitas pasar tradisional. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pemerintah telah melakukan upaya pembangunan pasar tradisional di Kabupaten Kediri. Ide pembangunan pasar tradisional merupakan gagasan awal yang berasal dari Bupati Kabupaten Kediri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Pasar Wonokerto, sebagai berikut:

“Pembangunan pasar tradisional di Kabupaten Kediri adalah ide dari Ibu bupati yang sudah beliau sampaikan sejak kampanye dulu. Beliau menginginkan masyarakat Kabupaten Kediri untuk nyaman dan senang ke pasar, jadi ekonomi pun berputar dengan baik. Pedagang senang, masyarakat juga puas. Karena di pasar itu semua terlibat, ada pedagang, petani, tukang parkir dan lainnya.” (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2018)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Bidang Perdagangan yang menyatakan sebagai berikut:

“pembangunan pasar tradisional ini merupakan janji politik, jadi perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pasar tradisional merupakan perencanaan politik yang disampaikan oleh ibu bupati langsung, karena ibu bupati melihat bahwa keberadaan pasar tradisional akan semakin tergusur dengan manjamurnya pasar-pasar modern, untuk itu perlu pembenahan pasar. Yang kemudian janji tersebut diakomodasi didalam RPJMD.” (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

Selanjutnya dijelaskan oleh Kepala Bidang Perdagangan bahwa salah satu strategi peningkatan kualitas pasar ialah melakukan pembangunan sarana dan prasarana pasar tradisional,

“Pembangunan pasar ini diharapkan kedepannya ialah pasar tradisional dibangun dengan struktur bangunan yang modern, fasilitas, sarana dan prasarana modern, akan tetapi masih tetap mempertahankan nilai-nilai khas pasar tradisional, seperti tawar menawar, interaksi sosial yang baik, harga kebutuhan pokok yang terjangkau.” (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

Dengan adanya perencanaan pembangunan pasar tradisional tersebut, maka pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Kediri melalui anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Provinsi dan juga Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) Kabupaten Kediri yang berjumlah 30 Miliar dimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan lima pasar tradisional yaitu Pasar Wonokerto, Pasar Induk Pare, Pasar Gurah, Pasar Kandangan, Pasar Kunjang. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Perdagangan sebagai berikut:

“Untuk pembangunan pasar diseluruh Kabupaten Kediri ini, terdapat lima pasar secara keseluruhan, hal ini dikarenakan kelima pasar tersebut memiliki jumlah pedagang yang cukup besar. Perubahan cukup banyak dilakukan agar

tampilan pasar bisa lebih menarik dan membuat pembeli nyaman berbelanja. Serta adanya perbaikan jalan, penambahan fasilitas dan lain-lain.” Wawancara pada Tanggal 23 Februari 2018)

## **2) Karakter Sosial Masyarakat Kabupaten Kediri**

Keberadaan pasar tradisional di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan keberadaannya, hal ini menunjukkan adanya potensi besar yang dimiliki pasar tradisional. Pasar merupakan cerminan dari suatu daerah itu sendiri, hal ini terlihat dari interaksi sosial yang terdapat didalamnya, tentunya keberadaan pasar tradisional ini adalah warisan turun temurun yang harus dijaga dan juga dikembangkan potensinya. Pasar jika dikaji secara jernih memang memiliki beberapa posisi strategis dihati masyarakat yang tak tergantikan begitu saja oleh pasar modern.

Pasar tradisional adalah representasi dari ekonomi rakyat terutama pada ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan para petani, nelayan, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. Ribuan masyarakat di Kabupaten Kediri masih mempercayakan pengadaan kebutuhan sehari-hari mereka pada pasar tradisional yang identik dengan kelompok menengah kebawah tersebut.

Selain itu dengan karakteristik pasar tradisional yang didalamnya terdapat proses tawar menawar yang merupakan ciri khas dari pasar tradisional, tentunya hal ini bisa memunculkan kedekatan emosional antara pedagang dan pembeli. Karakter inilah yang merupakan cerminan dasar masyarakat di Kabupaten Kediri yang juga mengutamakan sisi sosial kemasyarakatan. Dengan adanya hubungan



emosi ini tentunya pihak pembeli akan lebih nyaman dan *kerasan* untuk kembali ke pasar tradisional.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan pasar tradisional mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak, dalam satu pasar tradisional saja terdapat pedagang minimal 100 pedagang, tentunya dengan kondisi pasar tradisional yang lebih besar lagi maka akan menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Wonokerto merupakan salah satu pasar di Kabupaten Kediri yang menyerap tenaga kerja dalam pasar cukup banyak yaitu sekitar 1000 pedagang, hal ini belum dihitung dari pedagang kaki lima yang berada disekitar pasar, pedagang klontong, tukang parkir, dan lain sebagainya. Tentunya jumlah tersebut sudah selayaknya dihubungkan pula dengan para pekerja yang secara tidak langsung berhubungan dengan pasar tradisional seperti para petani, peternak, pengerajin, dan lain sebagainya.

Kondisi demikian juga dijelaskan oleh Kepala UPTD Pasar Wonokerto yang menyatakan sebagai berikut:

“Ya mas, kita pun menyadari akan keberadaan Pasar Wonokerto ini yang tentunya butuh banyak perbaikan baik berupa SDMnya, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Akan tetapi dengan adanya masyarakat di Kabupaten Kediri ini yang masih berduyun-duyun untuk datang ke pasar, hal itu juga menjadi salah satu faktor yang dimiliki pasar tradisional untuk tetap terus eksis di Kabupaten Kediri.” (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2018)

Apa yang telah disampaikan diatas diperkuat dengan pernyataan oleh salah seorang pengunjung pasar yang sudah cukup tua, beliau menyampaikan bahwasannya pasar tradisional seperti rumah kedua baginya, karena berada di



pasar ini bisa berinteraksi dengan banyak orang dan juga merasakan kesenangan dikarenakan hal itu. Hal ini seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“Pasar ya adanya seperti ini mas, alhamdulillah sekarang itu tambah bagus mas, dulu masih jelek. Tapi alhamdulillah saya disini senang mas, banyak orang yang belanja, banyak pedagang juga, jadi bisa saling kenal, ngobrol banyak hal mas.” (Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017)

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu pendorong adanya pemberdayaan pedagang pasar tradisional di Pasar Wonokerto ialah adanya faktor sosial kemasyarakatan, dimana banyaknya masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada pasar tradisional selain itu juga masih banyaknya masyarakat yang mempercayakan pemenuhan kebutuhan mereka pada pasar tradisional yang memang memiliki harga yang terbilang lebih murah dibandingkan pasar modern dan tentunya berdampak pada hubungan emosional antara pedagang dan pembeli dengan adanya karakteristik pasar tradisional yang identik dengan tawar menawar.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1) Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah**

Salah satu faktor keberhasilan suatu pemberdayaan adalah salah satunya ialah faktor kualitas daripada sumber daya manusia tersebut. Semakin baik tingkatan kualitas sumber daya manusia, maka semakin mendekati keberhasilan dari tujuan pemberdayaan tersebut. Meskipun faktor kualitas sumber daya manusia bukanlah menjadi faktor yang dominan dari suatu keberhasilan pemberdayaan.

Kondisi di mayoritas pasar tradisional, mayoritas pedagangya adalah mereka yang memiliki tingkat jenjang pendidikan formal yang rendah, mayoritas dari mereka adalah yang tidak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), meskipun demikian mereka memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam dunia perdagangan. Akan tetapi tentunya tingkat kualitas pendidikan mereka secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada pola pikir ataupun cara mereka dalam berdagang maupun melayani pembeli.

Kondisi pasar tradisional di Kabupaten Kediri, mereka para pedagang yang minim ilmu pengetahuan ataupun rendah kualitas sumber daya manusianya, kerap kali mereka tidak mampu melayani pembeli dan pelanggan secara optimal. Bahkan sering terjadi cekcok antara pembeli dan pedagang, padahal bila seorang pedagang mampu menaklukkan hati pembeli dengan gaya sopan dan lembut, justru akan meningkatkan nilai tambah terhadap produk atau barang yang ditawarkan. Kerap kali hal ini terjadi pada pedagang yang masih kurang memiliki pengalaman dalam berdagang terutama mereka yang masih berumur muda, kerap kali mereka mudah terpancing emosi ketika tawar menawar dengan pembeli yang mengakibatkan calon pembeli urung membeli barang dagangannya.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan yang menyatakan sebagai berikut:

“Pedagang-pedagang itu sangat sulit mas untuk ditertibkan, mereka terkadang seenaknya sendiri. Ya ini salah satu kekurangan di pasar sendiri adalah kualitas sumber daya manusianya yang rendah, mayoritas mereka yang di Pasar Wonokerto itu sekolahnya tidak sampai lulus SMP. Meskipun mereka memiliki pengalaman yang cukup banyak, tapi yang namanya *mindset* itu agak sulit dirubah.”(Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

Permasalahan lain yang ditimbulkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah pedaganglah yang merusak sendiri fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Seperti halnya pedagang yang menempatkan barang dagangannya yang tersisa pada tempat yang tidak seharusnya. Sehingga hal ini merusak pemandangan, keindahan, serta merusak lapak ataupun kios pedagang itu sendiri.

Hal ini juga dikeluhkan oleh salah satu petugas lapangan UPTD Pasar Wonokerto yang saat itu sedang keliling pasar, menyatakan sebagai berikut:

“Kita itu sudah sering mas mengingatkan pedagang yang nakal-nakal itu, mereka masih suka menyimpan barang-barang dagangan mereka yang tidak laku, yang mudah busuk di kios-kios mereka sendiri, ya kan baunya jadi tidak enak mas kalau terus-terusan seperti itu. Kita sih memaklumi itu karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, akhirnya kesadaran mereka tentang kebersihan dan juga cara mereka melayani pembeli juga kurang memuaskan. Kalau yang masih muda-muda itu, pedagang muda itu kerap kali tidak sabaran sewaktu melayani pembeli, akhirnya ya cekcok, ujung-ujungnya ya jualannya batal dibeli sama calon pembeli itu mas, kan yang rugi mereka sendiri sebenarnya, tapi ya mereka kalau dikasih tahu cuma *inggah inggih gitu tok*.” (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa salah satu faktor penghambat pembangunan pasar tradisional adalah diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yaitu para pedagang yang notabene mereka mayoritas berpendidikan rendah, hal ini berdampak pada pola pikir dan juga cara pedagang dalam melayani pembeli.

## **2) Fasilitas Pasar Kurang**

Salah satu hal yang membuat pembeli merasa nyaman saat berbelanja ialah adanya tempat yang bersih dan nyaman. Mayoritas keadaan pasar tradisional di seluruh Kabupaten Kediri, bahkan diseluruh Indonesia ialah pasar yang kumuh.

Selain dikarenakan perilaku yang buruk dari pengunjung pasar maupun oleh pihak pedagang pasar tradisional sendiri, hal ini juga dipicu dengan minimnya fasilitas yaitu tempat sampah.

Di Pasar Wonokerto sendiri, pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan akhir yang berada cukup jauh dari lokasi pusat jual beli di pasar, pemerintah juga sudah menyediakan bank sampah. Akan tetapi kurangnya fasilitas tempat sampah yang berada di dalam pasar dan disekitar-sekitar lokasi pusat jual beli menyebabkan sampah masih berserakan di pasar. Tentunya hal inilah yang menjadikan citra dari pasar tradisional semakin buruk.

Salah seorang pedagang sayur mengeluhkan hal ini, beliau beranggapan bahwa salah satu penyebab pasar tradisional citranya buruk adalah karena sampah yang berserakan, hal ini dikarenakan kurangnya tempat sampah yang berada di sekitar pasar. Sebagaimana apa yang telah beliau nyatakan sebagai berikut:

“Ya kalau kita sebagai pedagang disini sebenarnya suka mas kalau pasarnya bersih, kan enak dilihat dan lebih nyaman. Tapi ya gimana mas, kita gak punya tempat sampah disini mas, kadang ada orang beli nantinya bungkusnya atau apanya gitu dibuang langsung di jalan. Harapannya sih di dekat-dekat kios ini lo mas setidaknya dikasih tempat sampah ya beberapa gitu kan supaya pasarnya jadi bersih, rapi, dan enak dilihat.”(Wawancara pada tanggal 27 Februari 2018)

Apa yang disampaikan oleh pedagang sayur tersebut juga diperkuat dengan pernyataan seorang petugas kebersihan yang berada di Pasar Wonokerto, beliau menyampaikan sebaga berikut:

“Untuk kebersihan kita ada jadwalnya bersih-bersih mas, yaitu pagi dan sore, tapi ya begini mas setelah pasarnya dbersihkan langsung kotor lagi karena disekitar pasar sangat sedikit tempat sampah, tempat sampahnya ya pembuangan akhir dibelakang pasar sana mas.” (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2018)

### 3) Keterbatasan Anggaran

Salah satu kendala yang terjadi pada seluruh kegiatan pemerintah di seluruh negara berkembang, lebih khusus pada Indonesia adalah adanya keterbatasan anggaran. Dinas dan Perdagangan sebagai dinas pengelola Pasar Wonokerto menyadari pentingnya pemberdayaan bagi pedagang, lebih khusus berupa pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan untuk pengelola pasar dan pedagang pasar itu sendiri. Akan tetapi dengan keterbatasan anggaran, maka pemerintah Kabupaten Kediri lebih mengarahkan anggaran pada aspek pembangunan saja. Sehingga aspek untuk peningkatan kualitas pedagang pasar tradisional melalui pendidikan dan pelatihan tidak bisa direalisasikan.

Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam undang-undang maupun dalam peraturan daerah sebenarnya memang telah disebutkan mas bahwa salah satu pemberdayaan pedagang pasar adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, akan tetapi pemerintah Kabupaten Kediri saat ini lebih fokus pada perbaikan aspek bangunan dimana hak itu juga telah diatur dalam RPJMD dari apa yang disampaikan Ibu Bupati saat kampanye dulu.” (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan menyadari pentingnya untuk melakukan pemberdayaan pedagang pasar tradisional khususnya Pasar Wonokerto dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, akan tetapi dengan terbatasnya jumlah anggaran maka hal itu masih belum bisa untuk dilaksanakan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional**

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar masyarakat dalam beraktifitas dalam kesehariannya, tak dipungkiri dengan adanya keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan maka muncullah persaingan-persaingan bisnis. Salah satunya ialah persaingan antara pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah dengan pasar modern yang dikelola oleh swasta, namun dapat kita simpulkan bahwa pasar modern lebih menjadi primadona dikalangan masyarakat karena berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki.

Namun keberadaan pasar tradisional tidak boleh hanya dipandang sebelah mata saja, karena pasar tradisional merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat, dikarenakan jumlah tenaga kerja yang ada pada pasar tradisional dimana hal ini berhubungan langsung dengan mereka yang bekerja sebagai petani, peternak, dan lain sebagainya. Tentunya muara dari barang yang mereka produksi ialah pada pasar tradisional. Selain itu, pasar tradisional juga memiliki berbagai macam potensi yang sangat penting untuk dikembangkan seperti halnya potensi sosial dan pendapatan daerah. Potensi sosial, dengan adanya interaksi antara pedagang dan pembeli yang tidak kita temukan pada pasar modern, tentunya ini menjadi nilai tambah pasar tradisional sekaligus hal ini mampu mewujudkan sosial masyarakat yang baik. Potensi pendapatan daerah beberapa diantaranya ialah diperoleh melalui retribusi pada pasar tradisional baik retribusi kios maupun



parkir, tentunya dengan banyaknya pedagang dan pembeli yang ada pada pasar tradisional akan menambah jumlah pendapatan daerah melalui retribusi tersebut.

Akan tetapi, dengan semakin pesatnya perkembangan pasar modern, dan semakin meluasnya citra pasar tradisional yang buruk dikalangan masyarakat terutama para pemuda yang dengan gengsinya lebih memilih pasar modern. Citra pasar tradisional yang buruk ini perlu untuk dievaluasi oleh pemerintah, untuk itu salah satu hal yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan pemberdayaan kepada pedagang pasar tradisional, karena salah satu faktor utama untuk meningkatkan citra pasar tradisional ialah pada sisi pedagang tersebut.

#### **a. Penguatan Pedagang Pasar Tradisional**

##### **1) Sosialisasi**

Pada dasarnya mengandung unsur pemberian kewenangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ini pedagang pasar tradisional. Mengingat dalam setiap perspektif kehidupan masyarakat yang berbeda-beda pasti akan memunculkan filosofi, asumsi, cara berpikir yang berbeda-beda pula, untuk itu agar suatu implementasi perubahan dapat berjalan efektif dibutuhkan suatu reorientasi. Reorientasi tersebut berfungsi untuk menyamakan suatu pandangan baik yang dilakukan oleh pemerintah dan pedagang Pasar Wonokerto.

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui dinas yang terkait dengan operasional pasar tradisional yaitu Dinas Perdagangan bersama dengan pedagang Pasar Wonokerto secara bersama-sama melakukan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional yang tentunya diharapkan mampu untuk mewujudkan pedagang yang mandiri dan yang mampu bersaing dengan pasar modern, hal ini



sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Siagian (2012) yang menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian terstruktur dari usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara bersama, masyarakat dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Dinas Koperasi Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi kepada para pedagang daging dan ayam di Pasar Wonokerto, sosialisasi tersebut berisikan materi pengetahuan tentang kualitas daging sapi maupun ayam, serta materi tentang bahayanya daging gelonggongan yang terkadang para pedagang yang nakal melakukan kecurangan ini sehingga daging terlihat lebih besar akan tetapi terdapat bakteri-bakteri berbahaya yang tumbuh didalamnya, hal ini bertujuan untuk menyatukan pandangan bersama para pedagang agar mereka yang sejatinya dalam berjualan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya tidak harus berurusan dengan masalah hukum dikarenakan kecurangan yang pedagang lakukan. Dengan adanya sosialisasi ini maka pengetahuan para pedagang juga akan bertambah, sehingga pedagang akan lebih dewasa dan berhati-hati dalam berdagang, dan yang lebih penting daripada itu ialah akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kepada para pedagang karena kejujurannya sehingga masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan kembali lagi ke pasar tradisional.

Hal ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan kepada para pedagang dalam memberikan kekuatan kepada para pedagang Pasar Wonokerto, seperti apa yang telah disampaikan Suharto (2006) yaitu pemberdayaan ialah memperkuat

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya hal ini akan meningkatkan pengetahuan para pedagang.

Akan tetapi sosialisasi ini tidak bisa dirasakan oleh seluruh pedagang Pasar Wonokerto, dimana dalam pasar tersebut juga banyak pedagang selain pedagang daging sapi dan ayam, akan lebih bermanfaat bila suatu pemberdayaan bersifat menyeluruh kepada para pedagang di pasar tradisional.

## **2) Pengarahan Informal**

Unsur utama dari suatu pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. kedua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu apabila masyarakat dalam hal ini adalah pedagang telah menerima kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas yang baik untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya pun tidak akan bisa berjalan optimal.

Masyarakat dalam hal ini pedagang dikatakan kurang mendapatkan pemberdayaan jika kedua hal yaitu kewenangan dan kapasitas tidak dimiliki, hal itulah yang menyebabkan kondisi kehidupan menjadi tidak sejahtera. Dalam penelitian ini pemerintah Kabupaten Kediri telah memberikan kewenangan kepada pedagang untuk menjalankan aktifitas jual beli pada Pasar Wonokerto dan juga berupaya meningkatkan kapasitas para pedagang Pasar Wonokerto, hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pemberdayaan yang disampaikan oleh Sulistyani (2004) yang menjelaskan bahwa tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat

dimana salah satu tahapannya ialah tahapan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat ini, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat.

Selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh pedagang, maka pemerintah yaitu Dinas Perdagangan sering kali berada pada pasar tradisional untuk memberikan pengarahan yang berupa arahan secara lisan dan secara informal. Dapat diketahui pada Pasar Wonokerto sering kali pedagang kurang memperhatikan kualitas, penataan barang dagangan yang tidak rapi, kurangnya memperhatikan kebersihan atau higienitas dari barang dagangan yang diperjual belikan. Selain itu pemerintah juga memberikan pengarahan kepada para pedagang tentang bagaimana cara mereka menarik minat calon pembeli agar membeli barang dagangan mereka. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prastyawan (2014) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan pedagang pasar tradisional dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen bisnis modern, cara-cara menata dagangan, higienitas, serta cara-cara dalam melayani konsumen. Berkaitan dengan cara menarik pembeli salah satu yang terpenting adalah dengan memperhatikan kualitas barang dagangan, hal ini seperti yang dijelaskan Zulkifli (2012) bahwa pemeliharaan pelanggan, dengan menjaga barang dagangan serta tidak adanya penipuan dalam timbangan.

Pemerintah juga telah mengatur berkaitan dengan pemberdayaan perdagangan pasar tradisional beberapa diantaranya adalah pada Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dimana pada pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa Kepala Daerah melakukan pemberdayaan pasar tradisional salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pedagang pasar tradisional. Apa yang dimaksud dengan peningkatan kompetensi pedagang pasar tradisional telah dijelaskan pada Pasal 20, peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b antara lain:

- a) Pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b) Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c) Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan memahami perilaku pembeli.

Pemerintah Kabupaten Kediri sendiri telah mengatur berkaitan dengan pemberdayaan pedagang pasar tradisional berkaitan dengan peningkatan kapasitas pedagang yaitu dengan melakukan pembinaan kepada para pedagang yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.

### **3) Ketertiban**

Pasar tradisional memang kerap digambarkan sebagai suatu lokasi yang becek, bau, dan kotor serta berbagai stigma buruk yang melekat pada *image* pasar tradisional. Fakta yang terjadi memang menunjukkan bahwa stigma itu benar

adanya. Pada kasus yang terjadi di Pasar Wonokerto seperti apa yang dipaparkan dalam penyajian data dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari sisi ketertiban adalah salah satunya ialah perilaku buruk pedagang dan pengunjung pasar yang membuang sampah secara sembarangan, hal ini mengakibatkan pasar nampak kumuh dan berbau tidak sedap.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan melakukan penertiban kepada para pedagang sehingga pedagang bisa bersikap lebih dewasa untuk menjaga kebersihan pasar. Permasalahan kebersihan pasar ialah salah satu bentuk permasalahan tanggung jawab sosial, karena berkaitan langsung dengan banyak orang. Zulkifli (2012) telah menyinggung berkaitan dengan salah satu kunci kesuksesan suatu pemberdayaan masyarakat ialah ketertiban serta keindahan pasar dengan tidak membuang sampah ataupun limbah pasar yang perlu diperhatikan, untuk itu ketertiban pedagang dalam hal menjaga kebersihan sangatlah penting. Pemerintah juga telah mengatur tentang kedisiplinan para pedagang ini dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b antara lain adalah dengan pembinaan disiplin pedagang dan pembeli pasar tradisional.

Kelebihan pasar modern adalah tertatanya dengan rapi barang-barang yang diperdagangkan sesuai dengan jenis barang tersebut. Hal ini harus menjadi suatu perhatian bagi pihak pengelola pasar agar pengunjung ataupun calon pembeli akan

dengan mudah memperoleh barang dagangan yang dicarinya. Kondisi yang terjadi di pasar tradisional di Kabupaten Kediri, pihak pengelola pasar tidak mengelompokkan jenis barang dagangan tersebut, sehingga pasar terkesan berantakan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yaitu pasar tradisional merupakan tempat usaha beragam dan menyatu, namun tetap terdapat pengelompokkan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging. Hal ini juga dijelaskan dalam dokumen SNI Pasar Rakyat (2015) dalam bab zonasi disebutkan bahwa dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan dan tempat pemotongan unggas hidup. Untuk itu pihak pengelola sudah selayaknya menempatkan barang dagangan sesuai dengan kelompoknya masing-masing.

Pada hasil penelitian telah dipaparkan bahwasannya Pasar Wonokerto telah melakukan revitalisasi pada tahun 2015 yang salah satunya ialah dengan mengatur zonasi atau tata letak pedagang sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan, seperti contohnya ialah pedagang sayur satu blok dengan pedagang sayur, seperti itu seterusnya. Hal ini merupakan salah satu usaha dari Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan citra pasar tradisional, yaitu dengan mengadopsi sistem *zoning* ini, meskipun mengadopsi sistem dari pasar modern, pasar tradisional tetap bercirikan pasar tradisional yang memiliki kekhasan tersendiri. Sistem *zoning* ini juga dijelaskan oleh Zulkifli (2012) bahwa pada penataan pasar

tradisional haruslah memperhatikan sistem zonasi yang rapi dan efektif, hal ini untuk mempermudah konsumen dalam menemukan barang yang dibutuhkan.

#### **4) Paguyuban Pasar**

Paguyuban pedagang pasar memegang peranan penting pada pengelolaan pasar tradisional milik pemerintah daerah bersama dengan pihak pengelola pasar dalam bentuk pola kemitraan. Oleh karenanya disetiap pasar tradisional perlu dibentuk paguyuban pedagang, sehingga tugas pihak pengelola pasar menjadi lebih ringan mengingat pada umumnya pengelola memiliki keterbatasan jumlah personil dan dana yang tersedia. Untuk membentuk paguyuban pedagang di pasar pada awalnya harus terlebih dahulu dilakukan upaya untuk membiasakan para pedagang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil sebagai media berhimpun dalam berbagai kegiatan, selain itu suatu paguyuban pasar tradisional juga dapat terbentuk dengan adanya kesamaan visi dan tujuan.

Paguyuban pedagang pasar di Pasar Wonokerto merupakan salah satu paguyuban pasar yang awalnya terbentuk secara alamiah, hal ini karena tumbuh dan berkembangnya pedagang pasar melalui proses keseharian di pasar tradisional. Dengan adanya paguyuban pedagang Pasar Wonokerto ini maka memudahkan pihak pengelola pasar dalam menjalankan operasional pasar tradisional, beberapa diantaranya ialah paguyuban pedagang Pasar Wonokerto sebagai penyambung lidah program-program pemerintah kepada para pedagang pasar khususnya yang berada di Pasar Wonokerto. Pentingnya keberadaan paguyuban pasar tradisional ini telah dijelaskan oleh Soetomo (2013) yang menjelaskan bahwa paguyuban pedagang pasar yang juga merupakan institusi



lokal memiliki fungsi memfasilitasi tindakan bersama yang terpola, sehingga fungsinya bukan hanya suatu organisasi tetapi juga pranata sosial. Hal ini berarti paguyuban pasar yang berjalan sambil belajar, dalam proses belajar ini terutama melalui kemampuan pedagang dalam melakukan monitoring dan evaluasi, akan terjadi proses pendewasaan yang muara akhirnya ialah paguyuban pasar mampu menjadi instrumen pemberdayaan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang paguyuban pasar ini pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, pada pasal 22 yang menjelaskan bahwa kepala daerah memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang pasar tradisional yang biasa berbentuk paguyuban pasar. Selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada pasal 21 ayat (2), yaitu menjelaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban salah satunya ialah memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.

## **b. Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional**

### **1) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)**

Sebagai seorang pedagang pada pasar tradisional, dimana pasar tradisional dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, untuk itu dibutuhkan suatu aspek legalitas hukum yang mengikat sebagai pengakuan tempat usaha. Salah satu bentuk

daripada aspek hukum pada perdagangan adalah adanya Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang diterbitkan dan diatur dalam peraturan daerah. SITU berfungsi sebagai perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pedagang, dengan adanya SITU maka pedagang memiliki hak dan kewenangan untuk menempati kios-kios yang berada di Pasar Wonokerto.

Suharto (2005) menjelaskan akan salah satu aspek pendekatan pemberdayaan adalah perlindungan, dijelaskan olehnya perlindungan ialah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah. Hal ini berarti pemerintah memberikan kekuatan dan juga memberikan kewenangan kepada para pedagang Pasar Wonokerto yang pada dewasa ini terjadi persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Selanjutnya dengan adanya SITU ini pula maka pedagang bisa terbebas dari intimidasi dari pihak lain yang mengklaim bahwa lokasi atau kios yang dimiliki pedagang adalah miliknya, serta dari pengusuran lokasi tempat jual beli yang seringkali terdapat penertiban oleh satuan polisi pamong praja.

Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengatur berkaitan dengan SITU yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar, disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan fasilitas pasar yang bersifat tetap wajib memiliki SITU yang diterbitkan oleh Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang wajib memiliki

SITU jika ingin berdagang pada pasar tradisional. Selanjutnya, pada Pasal 5 dijelaskan tentang kewajiban pemegang SITU:

- a. Memanfaatkan tempat usaha sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan dala SITU;
- b. Membayar retribusi tepat waktu;
- c. Menjaga ketertiban, kesopanan, keamanan, dan kebersihan lingkungan pasar/pertokoan;
- d. Membayar tanggungan listrik dan air atas biaya sendiri;
- e. Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan/atau kebakaran pasar yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang SITU;
- f. Mengembalikan SITU kepada Dinas apabila sudah tidak dipergunakan kembali.

## **2) Zonasi Pasar Modern dan Tradisional**

Permasalahan umum yang terjadi pada berbagai pasar tradisional di Indonesia ialah pengelolaan zonasi yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam berbagai peraturan. Hal ini pula yang terjadi pada beberapa pasar tradisional di Kabupaten Kediri, yaitu keberadaan pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional. Dengan keberadaan pasar modern yang berdekatan tentunya hal ini akan mengancam eksistensi pasar tradisional yang didalamnya pun terdapat toko-toko klontong. Meskipun secara tidak langsung keberadaan mengancam pasar tradisional, namun dampak langsung akan dirasakan oleh toko klontong. Pada hasil penelitian diketahui bahwa pembangunan pasar modern di sekitar Pasar Wonokerto sudah berjalan sesuai dengan semestinya yang telah

diatur pada peraturan daerah, yaitu dalam peraturan daerah disebutkan bahwa pembangunan pasar modern berjarak minimal 1 kilometer dari pasar tradisional.

Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimana pada peraturan daerah tersebut sudah diatur bahwa pendirian pasar modern berjarak minimum 1000m dari pasar tradisional. Dengan pengaturan zonasi antara pasar modern dan pasar tradisional, tentunya hal ini juga sebagai bentuk perlindungan kepada pedagang pasar tradisional yang saat ini posisinya sedang lemah dibandingkan dengan pasar modern yang memiliki citra yang baik, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suharto (2005) bahwa salah satu bentuk pemberdayaan adalah perlindungan kepada masyarakat yaitu dengan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang masih lemah.

### **3) Jam Pelayanan Pasar Modern dan Pasar Tradisional**

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar, hal seperti yang dijelaskan oleh Belshaw dalam Devi (2013). Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum pada barang, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti: buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2012.

Dengan perbedaan pelayanan dan juga barang yang diperjual belikan tidaklah terlalu berbeda antara pasar tradisional dan pasar modern, maka hal ini berdampak pada daya saing diantara keduanya, akan tetapi dengan berkembangnya jaman, masyarakat akan lebih memilih pasar modern daripada pasar tradisional. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pedagang pasar tradisional oleh pemerintah ialah salah satunya pemerintah mengatur dalam peraturan daerah perbedaan jam pelayanan antara pasar tradisional dan pasar modern. Hal ini juga yang telah dilakukan pada Kabupaten Kediri, seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 9 yang menjelaskan tentang jam pelayanan pasar tradisional:

(1) jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket adalah sebagai berikut:

- a. Untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- b. Untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- c. Untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

(2) jam kerja minimarket adalah sebagai berikut:

- a. Untuk hari senin sampai dengan minggu, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- b. Untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB

Sedangkan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kediri sebagian besar jam mulai operasional pasar ialah pada dini hari hingga siang hari. Pasar Wonokerto merupakan salah satu pasar yang buka pada dini hari hingga siang hari.

### **c. Pemeliharaan Pedagang Pasar Tradisional**

#### **1) Pendirian Koperasi Pasar**

Salah satu kendala yang kerap kali dialami oleh para pedagang kecil, seperti pada pedagang pasar tradisional ialah keterbatasan modal usaha yang mereka miliki. Banyak para pedagang besar maupun kecil terpaksa harus gulung tikar dikarenakan keterbatasan modal yang ia miliki. Namun pedagang kecil dalam hal ini adalah pedagang pasar tradisional, memang memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan pedagang pasar dalam hal bertahan dari krisis ekonomi dikarenakan pedagang kecil tidak terlalu bergantung pada produk-produk impor sebagai bahan baku usaha mereka.

Akan tetapi untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka tetap saja para pedagang kecil tetap membutuhkan suntikan modal. Dengan adanya persaingan di pasar tradisional, tentunya untuk meningkatkan kualitas usahanya pedagang pasar tradisional membutuhkan pinjaman modal sebagai salah satu solusi yang dipilihnya. Meskipun sebenarnya pada hakikatnya hal ini tidak bisa menjadi jaminan pasti bagi pedagang pasar tradisional untuk menjaga eksistensinya. Tidak jarang pula dengan mengandalkan pinjaman modal pada bank justru para pedagang harus berpikir lebih mendalam tentang bagaimana cara mereka untuk melunasi hutang tersebut, yang tentunya terdapat jaminan barang yang dijaminkan kepada bank.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Kediri berencana akan mendirikan koperasi Pasar Wonokerto, dimana koperasi pasar dapat menjadi pilihan alternatif bagi para pedagang Pasar Wonokerto yang membutuhkan modal untuk meningkatkan kualitas jual beli mereka, serta koperasi juga berfungsi sebagai sentra kulakan yaitu koperasi memberikan fasilitas membeli barang-barang dari pedagang yang ada di Pasar Wonokerto untuk kemudian dijual lagi oleh koperasi. Pendirian koperasi ini dinilai oleh pemerintah Kabupaten Kediri sebagai salah satu upaya pemeliharaan pedagang Pasar Wonokerto, dengan begitu pedagang tetap bisa beraktivitas seperti biasa di pasar. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suharto (2005) bahwa salah satu bentuk pemberdayaan ialah menjamin pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi agar tetap kondusif dan terpeliharanya keseimbangan.



Pendirian koperasi ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional dari apa yang telah disampaikan oleh Zulkifli (2012) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengupayakan alternatif sumber pendanaan dalam memberdayakan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi apa yang terjadi selama ini adalah pedagang meminjam dana modal kepada teman-teman sesama pedagang dan juga kepada rentenir, dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak adanya bantuan dana dari pemerintah daerah kepada para pedagang, hal ini menunjukkan suatu hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberian subsidi kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Revitalisasi Pasar Wonokerto**

Pembangunan Pasar Wonokerto sesuai dengan hasil penelitian dimana pada tahun 2015. Hal ini dimulai dengan janji politik oleh Kepala Daerah terpilih yang menempatkan salah satu isu pembangunan di Kabupaten Kediri ialah

pembangunan pasar tradisional. Dimana hal ini berpijak pada kondisi nyata yang terjadi pada sebagian besar pasar tradisional di Kabupaten Kediri yang memiliki struktur bangunan yang kurang baik, pengelolaan pasar yang tidak baik, ancaman lain dari luar ialah semakin pesatnya pembangunan pasar modern seperti minimarket modern yang ada di Kabupaten Kediri. Padahal keberadaan pasar tradisional sangat penting keberadaannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hal ini tentunya bisa mengancam eksistensi pasar tradisional di Kabupaten Kediri, khususnya Pasar Wonokerto yang berada pada pusat keramaian di Kabupaten Kediri.

Dari apa yang menjadi janji politik oleh kepala daerah tersebut, selanjutnya dimuat dalam dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri tahun 2011-2016. Dimana perencanaan pembangunan pasar tradisional termuat dalam isi yang kelima yaitu “Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan”, dengan tujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokasi, terutama kontribusi dari pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari dan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Kediri yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif. Sedangkan sasaran utamanya ialah meningkatkan dan memprioritaskan peran-peran pasar tradisional, tentunya dengan pandangan ini pemerintah menempatkan pasar tradisional sebagai salah satu peninjau pencapaian visi dan misi Kabupaten Kediri. Dengan

begitu salah satu program prioritas ialah meningkatkan dan mengembangkan pasar tradisional.

Upaya pembangunan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat sehingga menuntut pembangunan pasar tradisional yang berkelanjutan. Arti berkelanjutan ialah mampu memberi kontribusi yang positif untuk jangka waktu yang panjang bagi ekonomi masyarakat, lingkungan dan sosial masyarakat. Serta berkelanjutan dalam arti pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan. Perencanaan Pembangunan pasar tradisional diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan pasar tradisional yang berfungsi untuk menjaga eksistensi pasar tradisional, tentunya dengan begitu akan membawa dampak positif suatu pembangunan seperti halnya kemandirian para pedagang dan juga meningkatnya perekonomian pedagang.

Pada misi kelima RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2011-2016 dinyatakan bahwa tujuan daripada misi tersebut ialah untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokasi, terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan mengembangkan potensi sumberdaya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Kediri yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah mengalokasikan dana 30 milyar secara keseluruhan pada pembangunan pasar tradisional di Kabupaten Kediri, sedangkan Pasar Wonokerto mendapatkan jatah yang paling banyak yaitu sebesar 22 milyar rupiah yang digunakan untuk merevitalisasi secara luas Pasar Wonokerto. Revitalisasi pasar Wonokerto ini merupakan salah satu faktor pendukung adanya

peningkatan citra Pasar Wonokerto, sebagaimana yang telah disampaikan Suyanto dalam Aziz (2013) bahwa konsep pemberdayaan adalah pembedayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki. Hal ini semakin diperkuat dengan apa yang dimaksud dengan pemberdayaan yaitu memberikan daya kepada masyarakat untuk mampu berdaya. (Sumodiningrat, dalam Sulistyani 2004)

Revitalisasi Pasar Wonokerto lebih difokuskan pada pengembangan aspek sarana dan prasarana seperti struktur fisik bangunan yang dibuat agar lebih menarik, penambahan seperti toilet, musholla, dan lainnya. Hal ini seperti yang termuat dalam peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada Pasal 21 ayat (2) pada huruf a, bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.

## **2) Karakter Sosial Masyarakat Kabupaten Kediri**

Kondisi sosial masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program pemberdayaan dalam hal ini ialah pemberdayaan pedagang pasar tradisional. Dalam kondisi yang ideal, masyarakat dapat menjadi tujuan/objek dari sebuah pemberdayaan sekaligus juga menjadi aktor atau subyek pemberdayaan.

Kondisi sosial masyarakat menjadi gambaran-gambaran yang terjadi pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, stratifikasi sosial yang membentuk hubungan hierarkis dalam proses kemasyarakatan, tingkat pendidikan, dan fakta-fakta sosial lainnya merupakan hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam rangka menyusun pemberdayaan masyarakat. pada penelitian ini ditemukan bahwa kondisi sosial masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung pemberdayaan pedagang pasar tradisional dimana sebagian besar masyarakat Kabupaten Kediri masih mempercayakan pemenuhan kebutuhan pada pasar tradisional dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti kota-kota besar, selain itu didalam pasar tradisional terdapat banyak orang yang terlibat tentunya akan menciptakan interaksi sosial yang berjalan dengan baik. Dan tentunya dengan adanya interaksi sosial yang baik ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. USDRP (2012) dalam tulisannya Pedoman Umum Pengelolaan Pasar menjelaskan tentang beberapa fungsi pasar tradisional yang salah satu fungsinya adalah fungsi sosial kemasyarakatan, yaitu:

- c) merupakan bentuk asli dari ciri khas ataupun karakter masyarakat Ruhnya pasar karena canda tawa, dan nilai-nilai kultural yang ada dimasyarakat dapat dipotret dalam keseharian mereka di pasar.
- d) merupakan wadah sosial untuk berinteraksi terutama mereka yang berkemampuan ekonomi rendah dan melakukan diskusi informal dari berbagai permasalahan yang sedang terjadi dikalangan masyarakat.

Dari beberapa uraian diatas maka beberapa faktor pendukung dari pemberdayaan pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan citra pasar tradisional ialah kondisi sosial masyarakat Kabupaten Kediri yang mayoritas masih tradisionalis sehingga masih mempercayakan pemenuhan kebutuhan di pasar tradisional.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1) Kualitas Sumber daya Manusia Rendah**

Kualitas daripada sumberdaya manusia (SDM) merupakan faktor yang dapat menjadikan suatu pemberdayaan tersebut berhasil atau tidaknya. Dari tingkat subyek pemberdayaan sampai pada tingkat obyek dari suatu pemberdayaan dibutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang baik.

Kualitas sumberdaya manusia yang baik tentunya akan berbanding lurus dengan perilaku dan sikap seseorang tersebut. Karena kualitas sumber daya manusia akan menentukan pola pikir dan arah pikir seseorang tersebut. Beberapa permasalahan yang terjadi pada pasar tradisional di Pasar Wonokerto, diketahui bahwa mayoritas kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pedagang adalah minim atau rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia, yang rata-rata dari mereka tidak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Mengengah Atas (SMA). Hal inilah yang mengakibatkan *mindset* atau logika berpikir yang hal tersebut menjadi dasar bagi pedagang dalam melakukan suatu aktivitas. Beberapa permasalahan yang terjadi diakibatkan minimnya kualitas sumber daya manusia itu ialah pedagang yang kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada pembeli, seain itu masih adanya perilaku-perilaku yang buruk dari pedagang dalam menyimpan barang dagangannya yang mudah busuk pada lapak-lapaknya sehingga membuat pasar tradisional terkesan lebih kumuh, kotor, dan berbau.

Dengan adanya kelemahan ini sudah selayaknya pemerintah melakukan suatu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada pedagang-pedagang dengan berbagai hal seperti memberikan pelatihan tentang

manajemen, memberikan pelatihan tentang pengelolaan pasar, dan lain sebagainya, hal seperti ini yang dijelaskan oleh prastyawan (2014) tentang pentingnya suatu langkah dari pemerintah dalam melakukan pembenahan pasar tradisional salah satunya dengan pembenahan pada sektor sumber daya manusia dengan cara melakukan pemberdayaan pedagang melalui pelatihan manajemen modern, pelatihan manajemen keuangan, cara-cara menata dagangan, higienitas serta cara-cara dalam melayani konsumen. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan zulkifli (2012) dimana kelestarian lingkungan dari pasar tradisional harus diperhatikan dengan baik agar terciptanya lingkungan pasar yang sehat.

## **2) Fasilitas Pasar Kurang**

Kebersihan pasar menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung untuk mendatangi pasar tradisional, akan tetapi dengan kondisi pasar yang tidak terjaga kebersihannya maka akan menimbulkan kesan negatif yang pada akhirnya membuat citra pasar tradisional menjadi semakin buruk. Kebersihan pasar menjadi hal yang sangat penting, pasar yang bersih adalah salah satu indikator pasar yang sehat, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Zulkifli (2012) beliau menjelaskan tentang indikator-indikator pasar tradisional yang ideal adalah sebagai berikut:

Karena itu indikator pengelolaan pasar yang sukses perlu mengikuti kaidah dibawah ini:

1. pengelolaan pasar dan manajemen pasar yang transparan dan profesional, yang secara konsekuen dan konsisten memberikan sanksi pada suatu pelanggaran.



2. rasa aman yang diberikan oleh petugas keamanan pada pembeli maupun penjual.
3. keindahan pasar dengan tidak membuang sampah apapun limbah pasar yang perlu diperhatikan.
4. Ketertiban terutama bagi pedagang dengan memenuhi segala peraturan sehingga menciptakan keamanan bersama.
5. Pemeliharaan dan juga penjagaan kualitas bangunan pasar dapat dilakukan baik secara bersama dengan kolaborasi pedagang, pembeli, maupun pengelola.
6. Pasar sebagai sarana interaksi sosial, dimana pasar adalah sarana tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai latar belakang hingga tercipta hubungan yang harmonis.
7. Pemeliharaan pelanggan, dengan menjaga kualitas barang dagangan, tidak adanya penipuan dalam timbangan.
8. Penyelenggaraan kegiatan dengan menggandeng pihak produsen dari suatu produk, sehingga menarik minat pengunjung.
9. Promosi dan “Hari Pelanggan”, daya tarik pasar tercipta dengan adanya karakteristik dan keunikan bagi pelanggan. Pengemasan yang baik akan menjadi daya tarik tersendiri. Pengelola pasar bekerjasama dengan pedagang untuk menentukan waktu tertentu “Hari Pelanggan”.

Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa Pasar Wonokerto meskipun telah mengalami revitalisasi pada tahun 2015 kemarin, akan tetapi masih kurangnya fasilitas berupa tempat sampah, hal ini mengakibatkan pembeli maupun pedagang

seringkali membuang sampah pada sembarangan tempat yang membuat Pasar Wonokerto nampak kotor, kumuh, dan berbau.

Untuk itu sudah selayaknya pemerintah menambahkan fasilitas tempat sampah pada tempat-tempat tertentu yang mudah dijangkau baik oleh pengunjung Pasar Wonokerto maupun oleh pedagang. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Zulkifli (2012) bahwa pada pembangunan pasar tradisional harus memperhatikan perencanaan tata ruang yang salah satunya adalah tempat sampah yang mencukupi.

### **3) Keterbatasan Anggaran**

Permasalahan umum yang terjadi di negara berkembang dalam melakukan suatu pemberdayaan ialah terbatasnya anggaran pada suatu program pemberdayaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Kediri menginginkan untuk terus berupaya dalam memberdayakan pedagang pasar tradisional lebih khusus ialah pada Pasar Wonokerto, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan, akan tetapi tidak tersedianya anggaran menjadikan hal tersebut tidak terwujud.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Kediri yang mengatur tentang operasional pasar tradisional, dimana dalam peraturan daerah tersebut telah diatur bagaimana pemberdayaan terhadap pedagang pasar tradisional, ialah salah satunya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pedagang pasar, tentunya hal ini berlawanan dengan apa yang tertuang peraturan daerah dimana sudah diatur dalam peraturan daerah akan tetapi pemerintah belum atau tidak adanya program khusus bagi pedagang pasar tradisional. Seharusnya pemerintah memberikan

suatu kebijakan dan kebijakan khusus berkaitan dengan pemberdayaan pedagang pasar sebagaimana dijelaskan oleh Pambudi (2013) bahwa pemberdayaan bermakna keluar sebagai upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat. pemberdayaan dalam segi ini bermakna sebagai pengendali yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat (Pambudi, 2013). Selanjutnya pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwasannya pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka pemberdayaan pedagang pasar tradisional dalam meningkatkan citra pasar tradisional di Kabupaten Kediri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, pemerintah Kabupaten Kediri bersama *stakeholder* terkait melakukan upaya penguatan pedagang pasar tradisional melalui sosialisasi, pengarahan informal, menjaga ketertiban dan adanya paguyuban pasar dalam studi kasus penelitian di Pasar Wonokerto Kediri kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan seperti sosialisasi kepada pedagang akan bahaya daging gelonggongan untuk menghindari pedagang melakukan pelanggaran dan menjual produk yang membahayakan konsumen.

Penguatan pedagang Pasar Wonokerto yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sering yaitu memberikan pengarahan yang berupa secara lisan dan secara informal. Dapat diketahui pada Pasar Wonokerto seringkali pedagang kurang memperhatikan kualitas, penataan barang dagangan yang tidak rapi, kurangnya memperhatikan kebersihan atau higienitas dari barang dagangan yang diperjual belikan.

*Kedua*, diperlukan upaya perlindungan pedagang Pasar Wonokerto yang salah satunya dengan pemerintah Kabupaten Kediri mengatur berkaitan dengan SITU yaitu pada peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar, disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan fasilitas pasar yang bersifat tetap wajib memiliki SITU yang diterbitkan oleh Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang wajib memiliki SITU jika ingin berdagang pada pasar tradisional.

*Ketiga*, pemberdayaan pedagang Pasar Wonokerto oleh pemerintah dilakukan melalui perencanaan pembentukan koperasi pasar. Koperasi ini dapat menjadi pilihan alternatif bagi para pedagang pasar wonokerto yang membutuhkan dana modal untuk meningkatkan kualitas jual beli mereka, serta koperasi juga berfungsi sebagai sentra kulakan yaitu koperasi memberikan fasilitas membeli barang-barang dari pedagang yang ada di Pasar Wonokerto untuk kemudian dijual lagi oleh koperasi. Pendirian koperasi ini dinilai oleh pemerintah Kabupaten Kediri sebagai salah satu upaya pemeliharaan pedagang Pasar Wonokerto, dengan begitu pedagang tetap bisa beraktifitas seperti biasa di pasar.

*Keempat*, dalam upaya pemerintah melakukan pemberdayaan Pasar Wonokerto ada faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan pasar dalam meningkatkan citra pasar tradisional. Faktor yang mendukung peningkatan citra Pasar Wonokerto di Kabupaten Kediri yaitu terlaksananya revitalisasi pasar. Upaya revitalisasi ini pernah dilakukan di Pasar Wonokerto pada tahun 2015 dimana melalui revitalisasi ini aktifitas di Pasar Wonokerto lebih tertata dan menarik banyak konsumen dan produsen untuk memanfaatkan Pasar Wonokerto menjadi sarana jual beli.

**Kelima**, selain itu, ada pula faktor yang menghambat pemberdayaan Pasar Wonokerto yaitu masih kurangnya fasilitas berupa tempat sampah, hal ini mengakibatkan pembeli maupun pedagang seringkali membuang sampah pada sembarangan tempat yang membuat Pasar Wonokerto nampak kotor, kumuh, dan berbau. Beberapa permasalahan yang terjadi pada pasar tradisional di Pasar Wonokerto diketahui bahwa mayoritas kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pedagang adalah minim atau rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia yang rata-rata dari mereka tidak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal inilah yang mengakibatkan *mindset* atau logika berpikir yang hal tersebut menjadi dasar bagi pedagang dalam melakukan suatu aktifitas.

## **B. Saran**

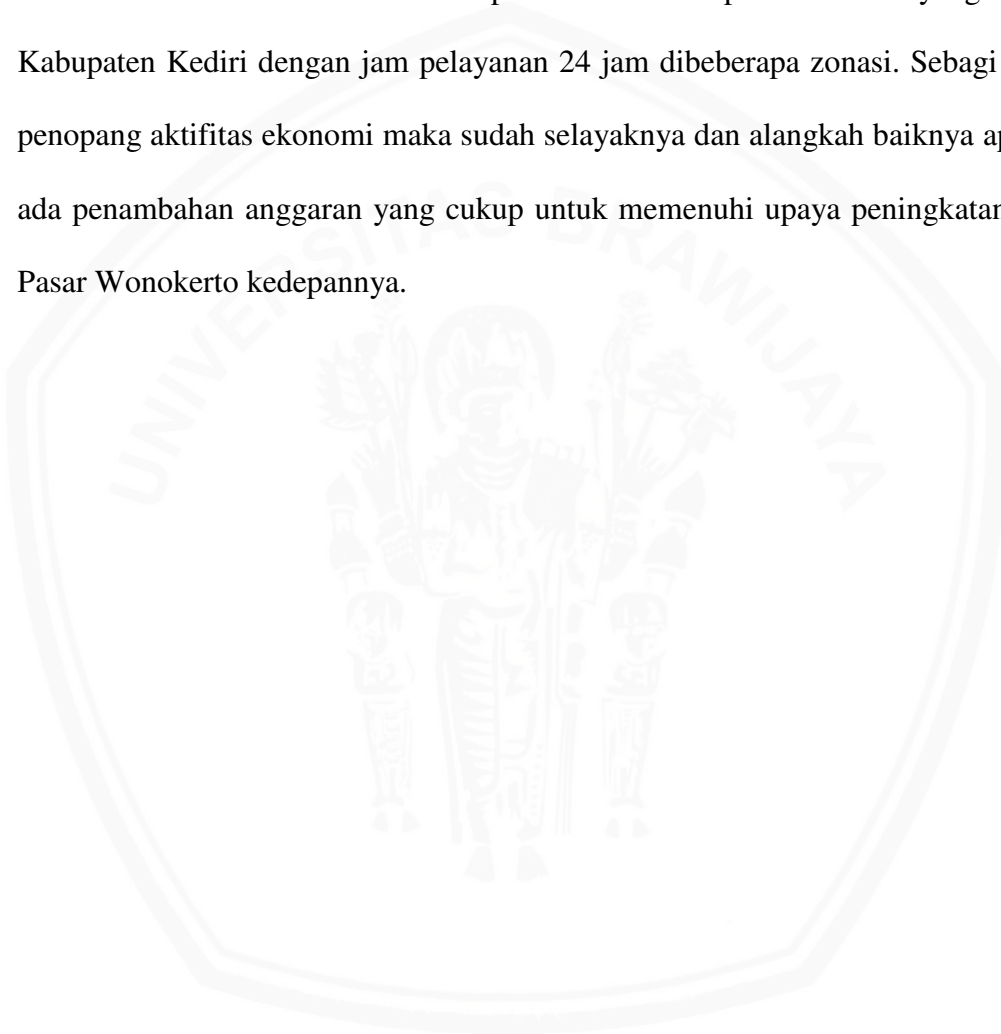
Menindaklanjuti beberapa faktor yang menghambat pemberdayaan Pasar Wonokerto dalam meningkatkan citra pasar tradisional berikut beberapa saran yang peneliti simpulkan agar kedepannya dapat menjadi pertimbangan untuk upaya pemberdayaan Pasar Wonokerto:

**Pertama**, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pedagang di Pasar Wonokerto melalui kerjasama antar *stakeholder*. Pemerintah memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas SDM dengan kerjasama yang baik terutama dengan para pedagang di Pasar Wonokerto sendiri.

**Kedua**, pembenahan fasilitas di area Pasar Wonokerto. Fasilitas merupakan aspek penting dalam menunjang aktifitas yang terjadi di Pasar Wonokerto. Sudah selayaknya pemerintah menambahkan fasilitas tempat sampah pada tempat-tempat

tertentu yang mudah dijangkau baik oleh pengunjung Pasar Wonokerto maupun oleh pedagang.

**Ketiga**, terkait anggaran dari pemerintah dalam anggaran Pasar Wonokerto sangat perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penambahan anggaran. Hal ini dikarenakan Pasar Wonokerto merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Kabupaten Kediri dengan jam pelayanan 24 jam di beberapa zonasi. Sebagai pasar penopang aktifitas ekonomi maka sudah selayaknya dan alangkah baiknya apabila ada penambahan anggaran yang cukup untuk memenuhi upaya peningkatan citra Pasar Wonokerto kedepannya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, Diana. & Hill. Peter. 1990. *An Introduction to Development planning in the Third World*. John Wiley & Sons.
- Cresswell, J, W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devi, N.M.W.R. 2013. *Pasar Umum Gubug Di Kabupaten Grobogan Dengan Pengolahan Tata Ruang Luar dan Dalam Melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme Ultitarian*. Tugas Akhir Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Harian Kompas, 2015. *Pasar Tradisional, Rumah Ekonomi Rakyat*. Kompas 18 juni 2015, hal 17.
- Idrus, M. 2017. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, Mattew, Hubberman, A Michale, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Metode Sourcebook*. SAGE Publication.
- Nugroho, D. Riant. 2009. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Pambudi, Himawan S. 2003. *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Prastyawan, Agus. 2014. *Revitalisasi Pasar Tradisional Menuju Pasar Modern dalam Perspektif Local Governance*. Malang.
- Prijono, Onny S Dan A. M. W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Suyanto, Bagong. "Pemberdayaan Komunitas Marginal di Perkotaan", dalam Aziz, Moh. Ali. 2012. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Metologis*. Yogyakarta: Lkis.
- Urban Sector Development Reform Project (USDRP). 2012. *Pedoman Umum Manajemen Pasar*.
- Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2013****TENTANG****PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN  
DI KABUPATEN KEDIRI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu dilindungi melalui pemberdayaan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan toko modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 47);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
dan  
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menerbitkan izin usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.
5. Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
11. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).



13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. Department Store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran dan langsung kepada konsumen barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Pusat perdagangan (*trade centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
17. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
22. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan toko modern.
23. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
24. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

## BAE II TUJUAN

### Pasal 2.

Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.



- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan toko modern.
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan

### BAB III PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Pasal 3

Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.

#### Pasal 4

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Minimarket, luas lantai kurang dari 400 m<sup>2</sup> ( empat ratus meter persegi ) ;
  - b. Supermarket, luas lantai 400 m<sup>2</sup> sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> ( lima ribu meter persegi ) ;
  - c. Hypermarket, luas lantai lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> ( lima ribu meter persegi ) ;
  - d. Department Store, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi ) ; dan
  - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> ( lima ribu meter persegi ).

- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern ditentukan sebagai berikut :
- Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya ;
  - Department Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen ;
  - Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

#### Pasal 5

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - Kepadatan penduduk;
  - Pertumbuhan penduduk;
  - Kemitraan dengan UMKM lokal;
  - Penyerapan tenaga kerja lokal;
  - Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus mempertimbangkan:
- Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
  - Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
  - Perkembangan pemukiman baru.

- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
  - a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
  - b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.
- (6) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk Minimarket.
- (8) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
  - a. Kepadatan penduduk;
  - b. Perkembangan pemukiman baru;
  - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
- (9) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

#### Pasal 6

- (1) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam daerah.
- (2) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.



- (3) Perkulakan, Hypermarket, Supermarket dan Department Store hanya diperuntukkan di kawasan Simpang Lima Gumul, sedangkan Minimarket yang berskala nasional, selain diperuntukkan di Kawasan Simpang Lima Gumul juga diperuntukkan di wilayah kecamatan perkotaan.
- (4) Supermarket dan Department Store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungandan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota atau perkotaan.

#### Pasal 7

- (1) Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir, tempat ibadah yang layak dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

#### Pasal 8

- (1) Jarak pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional minimal radius 1.000 meter.
- (2) Jarak pusat perbelanjaan dan toko modern (kecuali minimarket) dengan pusat perbelanjaan dan toko modern (kecuali minimarket) lainnya minimal radius 1500 meter.
- (3) Jarak pusat perbelanjaan dengan minimarket minimal radius 500 meter.
- (4) Jarak minimarket dengan minimarket lainnya minimal radius 500 meter.
- (5) Jarak minimarket minimal 50 meter dari warung/toko sejenis di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket.

#### Pasal 9

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut :
- untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
  - untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Kepala Daerah dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

- (3) Jam kerja minimarket adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

#### BAB IV KEMITRAAN USAHA

##### Pasal 10

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM paling sedikit 25% dari jumlah jenis barang yang dijual melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

##### Pasal 11

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.



- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
- Potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
  - Potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
  - Jumlah dari Potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
  - Potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
    - Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
    - Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);

3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. Biaya Promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
  1. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
  2. Biaya Promosi pada Toko Setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, *gondola* promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
  3. Biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
  4. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;



- i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. Biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
  1. Kategori *Hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
  2. Kategori *Supermarket* paling banyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
  3. Kategori *Minimarket* paling banyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau *SKU* (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

## Pasal 13

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB V  
PERIZINAN

## Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
  - a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
  - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
  - c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 15

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku:
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 16.

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
  - b. Omset penjualan setiap gerai;
  - c. Jumlah UMKM yang bermitra;
  - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

### Pasal 17

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menyampaikan laporan berupa:
  - a. Jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. Omset penjualan seluruh gerai;
  - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
  - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas.

## BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

### Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai kewajiban :
  - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
  - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen ;



- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha ;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha ;
  - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya ;
  - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya ;
  - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen ;
  - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah ;
  - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan ;
  - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha ;
  - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah ;
  - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap toko modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

#### Bagian Kedua

##### Larangan

##### Pasal 19

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli ;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat ;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan ;

- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa ;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Kepala Daerah;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Sanksi

#### Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 10 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 dikenakan sanksi administratif;
  - b. Pasal 19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. Pembekuan Izin Usaha;
  - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
  - a. akan menganggarkan dalam APBD dan mengupayakan sumber pendanaan lain, untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;



- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
  - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah:
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
  - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 22

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkan Peraturan ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (6) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (8) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket yang baru memiliki izin prinsip dari Kepala Daerah dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 5 - 9 - 2013

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 25 - 8 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

ttd

SUPOYO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH

H. SUPOYO, SH. MSI.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195807171986031018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN  
DI KABUPATEN KEDIRI

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan toko modern. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena toko modern di Kabupaten Kediri telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan toko modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pengusaha toko modern dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berfungsi sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan pasar dan toko modern yang semakin menjamur di setiap daerah, masih bersifat umum dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pelaku ekonomi di pasar tradisional dan para pengusaha kecil, sehingga masih diperlukan peraturan daerah yang dapat mengatur dan mengatasi permasalahan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Bahwa kewenangan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) dan Rencana Detail



Tata Ruang Kabupaten termasuk zonasinya, dan harus tetap berpedoman pada azas pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan perkulakan merupakan salah satu bentuk toko modern dengan sistem penjualan barang secara grosir.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Cukup jelas

#### Ayat (7)

Cukup jelas

#### Ayat (8)

Cukup jelas

#### Ayat (9)

Yang dimaksud pelaku usaha adalah pelaku usaha dengan modal dalam negeri bukan waralaba berskala nasional.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "minimarket berskala nasional" adalah minimarket sistem waralaba dengan modal dalam negeri yang dikelola oleh pemilik modal skala nasional dan/atau pemilik modal asing.

Yang dimaksud "wilayah kecamatan perkotaan" adalah sepanjang Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan A. Yani Timur dan Jalan HOS Cokroaminoto pada Kecamatan Pare.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud "sarana umum lainnya" antara lain tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran dan area bongkar muat dagangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 129**

## LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1: Foto Wawancara dengan Pegawai Dinas Perdagangan



Gambar 2: Foto Wawancara dengan Pedagang



Gambar 3: Foto Wawancara dengan Pedagang



Gambar 4: Foto Wawancara dengan Pedagang



## LAMPIRAN SURAT RISET



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 558914, 558226 Fax : +62-341-558227  
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id)

Nomor : 1771 /UN10.F03.11.11/ PN /2018  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Jln. Soekarno-Hatta No.1  
Kabupaten Kediri

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan penelitian/survey bagi mahasiswa :

Nama : Edi Sudrajad  
Alamat : Jl. Kenanga No. 2 Ds. Kedung Malang Kecamatan Papar Kabupaten Kediri  
NIM : 145030107111012  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi/Minat : Ilmu Administrasi Publik  
Tema : Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional  
Lamanya : 1 (satu) Bulan  
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 1 Februari 2018

Mengetahui,  
an Dekan  
Kema Prodi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti M.Si  
NIP. 19690524200212 2 002

## LAMPIRAN SURAT REKOMENDASI BAKESBANGPOL



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969

**KEDIRI**


Website : [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id) Email : [bakesbangpol@kedirikab.go.id](mailto:bakesbangpol@kedirikab.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**

**NOMOR : 070/147/418.62/2018**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  3. Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Menimbang :
1. Menunjuk Surat Saudara Ketua Program Pendidikan Administrasi Publik Fak. Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Malang tanggal 1 Februari 2018 Nomor : 1771/UN10.F03.11.11/PN/2018 perihal Penelitian/Survey;
  2. Surat persetujuan lokasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri tanggal 19 Februari 2018 Nomor : 070/658/418.29/2018 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **EDI SUDRAJAD**
  - b. Alamat : Jl. MT. Haryono No. 163 Malang 65145
  - c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
  - d. Instansi/Organisasi : Fak. Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Malang
  - e. Kebangsaan : Indonesia
- Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :
- f. Judul Proposal : *Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional*
  - g. Tujuan : Penelitian (Skripsi)
  - h. Bidang Survey : Ilmu Administrasi Publik
  - i. Penanggung Jawab : **Dr. Lely Indah Mindarti M.Si**
  - j. Anggota/Peserta : -
  - k. Waktu : Satu bulan sejak tanggal rekomendasi diterbitkan
  - l. Lokasi : Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
- Dengan ketentuan :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan.
  2. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.
  3. Data hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/survey hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akademis pemohon/peneliti dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan pemerintah/instansi lokasi kegiatan.
  4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan pemohon/peneliti agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 exemplar kepada Bakesbangpol Kabupaten Kediri.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri, 22 Februari 2018  
  
**Kepala BAKESBANGPOL**  
**KABUPATEN KEDIRI**  
*Kewaspadaan*  
**IWAN AGUS WIJAYA, S.Sos**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19710808 199101 1 001

**TEMBUSAN : Kepada Yth.**

1. Ibu Bupati Kediri ( sebagai laporan );
2. Sdr. Kepala Balitbangda Kabupaten Kediri;
3. Sdr. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri;
4. Sdr. Ketua Program Pendidikan Administrasi Publik  
Fak. Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Malang;
5. **A R S I P.**

## SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
DINAS PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 10 Telp/Fax. (0354) 683582

E-mail : disdag@kedirikab.go.id

KEDIRI - JAWA TIMUR - INDONESIA

Kode Pos : 64182

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/ 760 /418.29/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI PUDJIASTUTI, S.E., M.M.

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : EDI SUDRAJAD

NIM : 145030107111012

Fakultas : Ilmu Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang yang benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dengan terhitung sejak 22 Februari s/d 5 Maret 2018 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Citra Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Wonokerto, Kabupaten Kediri).*"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kediri, 7 Maret 2018  
Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEDIRI  
u.b Sekretaris  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



**DWI PUDJIASTUTI, S.E., M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19621125 198503 2 010